Bro 2870/11

PKI dan MPRS

PKI dan MPRS

D. N. Aidit
Njoto
Ir. Sakirman
Njono
Asmu
Nursuhud
K. Supit
J. P. Rissi
U. Lesteluhu
M. Tanggap Peleng
Suharti Suwarto
Sukatno

Joop Morriën
Amsterdam

Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1961

10779041
INT. INSTITUUT
SOC. GESCHIEDENIS
- JUNI 1997
AMSTERDAM

KATA PENGANTAR

Sidang pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia jang berlangsung dikota Bandung pada achir tahun 1960 telah mentjapai hasil² jang gemilang berkat adanja kerdjasama jang baik antara golongan² politik Nasionalis, Agama dan Komunis, dan antara golongan² politik dengan golongan² karja baik sivil maupun militer. Dua ketetapan, jaitu ketetapan tentang **Garis² Besar Haluan Negara** dan **Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama,** sudah dan akan memainkan peranan jang sangat penting dalam kehidupan politik Rakjat Indonesia sebagai **garis besar politik bersama** dan **program bersama** untuk menjelesaikan revolusi nasional-demokratis Indonesia sebagai sesuatu jang mutlak untuk menudju kemasjarakat Indonesia jang adil dan makmur.

Dua ketetapan bersedjarah tsb. diambil oleh MPRS dengan suara bulat. Golongan politik Nasionalis, Agama dan Komunis serta semua golongan karja memberikan suara persetudjuannja dengan tepuktangan jang gemuruh, sesudah masing² memberikan alasan²-nja.

Saja sangat gembira dengan penerbitan brosur ini, karena dengan ini mendjadi terpakukanlah untuk selama²nja dan setjara menjeluruh alasan² kaum Komunis menjetudjui kedua ketetapan MPRS tsb. Kaum Komunis tidak hanja telah ambilbagian jang sangat giat dalam semua sidang MPRS, tetapi djuga telah mengemukakan banjak fikiran jang realistis sehingga sangat membantu dalam mempertjepat sidang² MPRS

dan dalam mengambil keputusan² jang tepat sesuai dengan tugas sedjarah Rakjat Indonesia dalam tingkat perdjuangannja sekarang ini.

Ketua

Comite Central

Partai Komunis Indonesia

D. N. Aidit

Djakarta, 22 Djanuari 1961.

D.N. Aidit

Putusan² MPRS harus dilaksanakan dengan tenaga² anti-imperialisme dan anti-feodalisme jang lebih konsekwen

Pada tgl. 7 Desember 1960 MPRS telah menutup sidangnja jang pertama setelah madjelis tertinggi Rakjat Indonesia ini mengambil dua ketetapan penting, jaitu tentang **Garis² Besar Haluan Negara** dan **Garis² Besar Pola Pembangunan.**

Dengan adanja ketetapan pertama mendjadi diresmikanlah oleh lembaga negara tertinggi garis perdjuangan Rakjat Indonesia dalam melikwidasi imperialisme dan sisa² feodalisme, dalam membangun kehidupan nasionalnja jang berharidepan Sosialisme, dalam pelaksanaan politik luarnegeri jang anti-imperialisme dan untuk perdamaian dunia, dan dalam mewudjudkan kekuasaan politik gotongrojong daripada Rakjat Indonesia jang berdjuang.

Dengan adanja ketetapan nomor dua, maka untuk pertama kali Rakjat Indonesia lewat madjelis tertinggi-nja merumuskan program bersama mengenai bidang kehidupan jang bersifat materiil maupun kulturil. Saja berpendapat bahwa program bersama ini, baik jang dimuat dalam ketetapan nomor dua maupun jang dimuat dalam lampiran²nja, **adalah mentjerminkan semangat anti-imperialisme dan anti-feodalisme jang kuat dari Rakjat Indonesia, semangat ingin membina hidup baru jang modern dan progresif.**

Perumusan ketetapan nomor dua tentang „landreform" (perubahan tanah) adalah baik, pokoknja sistim tuantanah harus hapus dan tanah hanja untuk mereka jang menggarap.

Perumusan² tentang perekonomian pada umumnja adalah baik, tjukup disedari tentang pentingnja dan utamanja peranan sektor negara dibidang industri, distribusi, impor-expor, perhubungan dsb.

Semangat anti-imperialisme begitu kuatnja didalam MPRS sehingga usaha sementara orang untuk mentjantumkan „penanaman modal asing" dalam rangka pembiajaan pola dalam salahsatu dokumen MPRS mendjadi gagal samasekali. Soal „penanaman modal asing" sangat tidak populer dikalangan anggota² MPRS pada umumnja. Ini sepenuhnja sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakjat.

Dalam ketetapan nomor dua djuga ditjantumkan tentang agama mendjadi matapeladjaran di SR sampai dengan Universitas² Negeri dengan pengertian bahwa murid² berhak tidak ikutserta apabila walimurid atau murid dewasa menjatakan keberatannja. Kaum Komunis menerima perumusan ini, jang didjadikan sjarat mutlak dari fihak Islam, karena perumusan ini masih tetap mendjamin kesukarelaan dalam soal agama; bahwa tidak ada paksaan dalam soal agama. Ini adalah toleransi jang realistis baik dari fihak Komunis maupun dari fihak nasionalis dan kaum rasionalis lainnja.

Pendeknja, dengan ketetapan nomor satu dan nomor dua MPRS telah mentjiptakan iklim politik jang baik, jang harus dipelihara dan dikembangkan. Iklim politik sematjam ini tidak pernah didapat oleh Rakjat Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan ini.

MPRS sebagai madjelis tertinggi Rakjat Indonesia telah merumuskan program garis besar dan program terperintji untuk melikwidasi imperialisme dan feodalisme dari permukaan bumi Indonesia sebagai sjarat mutlak untuk masjarakat sosialis dikelak kemudian hari.

Program ini tidak mungkin dilaksanakan oleh orang² jang bersikap bantji terhadap imperialisme dan feodalisme, orang² jang hanja separoh² melawan imperialisme dan feodalisme. Program ini hanja dapat dilaksanakan oleh orang² jang kuat bersemangat anti-imperialisme dan anti-feodalisme dan oleh orang² jang benar² ber-tjita² Sosialisme, ber-tjita² hapusnja penghisapan atas manusia oleh manusia.

Banjak orang bertanja tentang apa sebabnja MPRS bisa bekerdja tjepat dan tepat. Saja berpendapat, bahwa ini dimungkinkan per-tama² karena tepatnja Presiden Sukarno menundjuk pimpinan MPRS, jaitu NASAKOM jang dipadu dengan karja (sivil dan militer). Kemudian pimpinan MPRS ini mendjalankan kebidjaksanaan sesuai dengan kebidjaksanaan Presiden Sukarno ini. Dengan ini banjak purbasangka dan kontradiksi² jang tak perlu dapat dihindari.

Komposisi pimpinan MPRS dan tjara-kerdja MPRS adalah model bagi Republik Indonesia untuk bisa bekerdja tjepat dan tepat. Apalagi untuk pelaksanaan Garis² Besar Pola Pembangunan, model ini harus benar² ditjontoh. Djika tidak, maka tidak ada satu soal penting dan pokok jang dapat diselesaikan setjara tjepat dan tepat di Indonesia.

Bandung, 8 Desember 1960

Njoto

Alasan² Golongan Komunis memperkuat Manipol dan perperintjiannja sebagai Garis² Besar daripada Haluan Negara

Saudara Ketua dan pimpinan sidang jang terhormat, Madjelis jang mulia,

Djalan perdjuangan sesuatu bangsa tidak pernah mudah. Begitupun djalan perdjuangan bangsa kita mentjapai suatu Indonesia jang merdeka penuh, bersatu, demokratis, adil dan makmur.

Sudah selang 15 tahun lebih sedjak Revolusi Agustus jang abadi itu mengobrak-abrik kehidupan lama dan mendirikan diatas reruntuknja kehidupan baru. Berapa banjak pengorbanan jang telah diberikan, berapa besar keichlasan Rakjat kita dalam perdjuangan jang besar itu, namun banjak masih idam²an kita jang tinggal idam²an. Politik „petjahbelah dan kuasai" kaum imperialis masih berhasil memisahkan Irian Barat dari pulau-pulau-saudaranja, modal monopoli asing masih menguasai sebagian dari hidup perekonomian kita, djuga invasi „kultur" imperialis jang merusak seperti tjandu, masih belum berachir. Presiden Sukarno tahu berterimakasih ketika beliau didalam „Amanat Negara"nja mengenang djasa² pemimpin² politik jang patriotik dari dulu hingga sekarang, dan mengenang pula djasa pradjurit² kita, resmi maupun tak resmi, jang punja andil

dalam perdjuangan mendirikan dan mempertahankan Republik.

Salah seorang penjair kita sekali pernah berkata :

Aku tjinta merdeka
karena aku kenal derita

dan dalam bait jang padat ini tersimpullah tekad merdeka bangsa kita jang diamanatkan oleh penderitaan Rakjat. Kaum Komunis Indonesia adalah sebagian dari Rakjat, jang sepenanggungan, seperdjuangan dan seharidepan dengan Rakjat itu sendiri.

Oleh sebab itu kaum Komunis Indonesia, jang suaranja saja wakili, menjetudjui dengan tanpa tjadangan sedikitpun hasil kerdja Komisi Manipol, jang berpokok memperkuat Manifesto Politik RI jang sudah kuat itu beserta perperintjiannja sebagai garis² besar daripada haluan negara, menetapkan „Amanat Pembangunan" Presiden sebagai garis² besar daripada haluan pembangunan, dan menetapkan „Djalannja Revolusi Kita" dan „Pidato PBB" Presiden sebagai bagian² jang tak terpisahkan dari Manifesto Politik.

Hanja 3 minggu sesudah Manifesto Politik diutjapkan oleh Presiden Sukarno, jaitu didalam Kongres Partainja 7 September 1959 kaum Komunis Indonesia memutuskan dalam suatu Resolusi, menganggap „Manipol RI" sebagai „dokumen penting bagi Rakjat Indonesia dalam melandjutkan revolusi nasionalnja jang belum selesai" dan berseru kepada seluruh Rakjat Indonesia „untuk mempeladjari dan mendiskusikan Manifesto Politik Presiden Sukarno, mendjadikannja pegangan dalam membantu, menjokong dan menagih pelaksanaan program Kabinet Kerdja".

Kemudian, seperti kita semua maklum, ber-turut² pada 25 September DPA memutuskan Manipol itu garis² besar haluan negara dan memberikan perperintjian atasnja, pada tanggal 10 November Presiden Sukarno me-

njetudjui keputusan DPA beserta perperintjiannja itu, pada tanggal 30 November Kabinet Kerdja dan pada achir tahun 1959 Depernas menjetudjuinja pula.

Tepat jang diterangkan dalam keputusan DPA bahwa „Dengan adanja Manifesto Politik ini untuk pertama kalinja Republik Indonesia, setelah berumur 14 tahun, mengumumkan lewat Kepala Negaranja sebuah dokumen bersedjarah jang mendjelaskan Persoalan² Pokok dan Program Umum Revolusi jang bersifat menjeluruh".

Pernah kita di-hari² revolusi, jaitu pada Hari Kebangunan Nasional 20 Mei 1948, menjusun suatu Program Bersama jang didukung bulat oleh Nasakom dan jang ketika itu disusun dibawah pimpinan patriot besar almarhum mahaputera Ki Hadjar Dewantara. Tetapi Program Bersama itu program Rakjat semata, sedang Manipol sekarang ini ja program Rakjat, ja program partai², ja program organisasi² massa, ja program Pemerintah, ja program atau garis² besar haluan negara.

Terlalu banjak sudah disepandjang waktu 15 tahun lebih ini enerzi ter-sia², kans² terbuang, bahkan djatuh pula pengorbanan² jang tidak perlu. Semua ini tentu harus ada achirnja, djika kita ingin melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Patokannja sebenarnja bersahadja : kita beladjar dari kesalahan² jang sudah², kita mentjegah terulangnja kesalahan² itu kembali, dan kita ubah kesalahan² mendjadi kebenaran², kegagalan² mendjadi sukses², kekalahan² mendjadi kemenangan².

Manifesto Politik dan Perperintjiannja memberi pegangan kepada kita untuk beladjar dari sedjarah kita sendiri, dari penjelewengan² jang pernah terdjadi dan dari ketepatan² jang pernah ditempuh. Didalam „Djalannja Revolusi Kita" Presiden Sukarno tegas mengatakan, bahwa kalau ingin tahu lebih terang apakah dasar-tudjuan dan kewadjiban revolusi Indonesia, kalau ingin tahu lebih terang apakah kekuatan² sosial revolusi Indonesia, apakah sifat revolusi Indonesia, apakah hari-

depan revolusi Indonesia, apakah musuh² revolusi Indonesia — kita ,,batjalah perintjian Dewan Pertimbangan Agung". Didalam ,,Djalannja Revolusi Kita" itu Presiden Sukarno mengatakan pula bahwa dengan djelasnja Manipol-Usdek, kita harus tahu ,,siapa kawan siapa lawan, siapa sahabat siapa musuh, siapa pro siapa kontra. Siapa *pro* Manipol dan Usdek adalah *kawan*. Siapa *kontra* Manipol dan Usdek adalah *lawan*. Didalam tiap² perdjuangan, — apalagi dalam Revolusi —, maka adalah satu keharusan mengetahui siapa *kawan* dan siapa *lawan*. Berbahaja sekali," kata Presiden kemudian, ,,untuk tidak mengetahui siapa-kawan-siapa-lawan itu. Berbahaja sekali untuk tidak mengetahui *kutubusuk² didalam selimut !*" Pendeknja, berbahaja sekali ,,djika penetapan siapa kawan siapa lawan itu dilakukan setjara *subjektif*. Sebab penetapan setjara subjektif itu mudah sekali 'salah wissel', sehingga menimbulkan pertentangan² jang tidak perlu dikalangan Rakjat". Ja, penetapan siapa-kawan-siapa-lawan setjara subjektif, Saudara Ketua, itulah jang diusahakan setiara intensif oleh musuh² Revolusi kita, musuh² Rakjat kita.

,,Salah wissel" harus ditjegah dalam konstelasi politik didalam negeri. Sebab masih ada misalnja kaum jang tidak suka akan persatuan Nasakom, padahal Presiden Sukarno menggariskan didalam ,,Djarek" bahwa kegotongrojongan Nasakom adalah ,,konsekwensi-politik jang terpenting", saja ulangi lagi, ,,konsekwensi-politik jang terpenting bagi semua pendukung Manifesto Politik dan Usdek, satu konsekwensi-politik jang tidak plintat-plintut atau plungkar-plungker". ,,Djika tidak", kata Presiden selandjutnja, ,,maka semua omongan tentang Gotongrojong, Manifesto Politik, Usdek, Front Nasional, 'setia kepada Revolusi', dan lain sebagainja, hanjalah omongkosong belaka, *lipservice* belaka". Bahwa menerima Manipol tetapi tidak menerima Nasakom itu omongkosong belaka, hal ini distrès lagi oleh Presiden Sukarno baru² ini di Surabaja. Hal ini lebih² lagi pentingnja disedari, karena ,,langkah² raksasa" sekarang ini berhasil diajunkan oleh MPRS, djustru berkat pimpinan gotongrojong.

,,Salah wissel" djuga harus ditjegah dalam kita menghadapi dunia luar. Musuh kita, seperti digariskan Manipol, adalah imperialisme. Sungguhpun begitu masih ada jang memusuhi jang anti-imperialis, dan mengawani jang imperialis. Malahan ada misalnja jang menjebut Inggris itu ,,suatu negeri sosialis", meskipun Inggris mengangkangi banjak djadjahan. Sebaliknja, negeri² sosialis, kepada siapa — seperti dikatakan Presiden Sukarno di Bandjarmasin dan Palembang baru² ini — kita boleh berterimakasih, terkadang disebut ,,imperialis". Kita lihatlah ,,salah wissel" ini : negeri sosialis disebut ,,imperialis", negeri imperialis disebut ,,sosialis" ! Dalam karjanja jang piawai, ,,Mentjapai Indonesia Merdeka", Bung Karno menulis : ,,Imperialismelah, dan pondorojotnja imperialismelah jang harus kita ingkari, tetapi musuh² imperialisme adalah kawan kita" ! Tulis Bung Karno seterusnja : ,,tidakkah suatu kebaikan, tidakkah suatu kefaedahan, tidakkah suatu k e h a r u s a n jang dimuka persekutuan imperialisme internasional itu, kita hadapkan pula persekutuan bangsa² jang masing² djuga melawan imperialisme internasional itu ? Tidakkah dus didalam hakekatnja suatu pengchianatan kepada kitapunja 'groote zaak', djikalau kita dimukanja persekutuan imperialisme ini mau berpolitik politiknja katak dibawah tempurung ?" Hal jang mentjerminkan ide internasionalisme Presiden Sukarno inipun lebih² lagi pentingnja disedari, karena kita, seperti dikatakan oleh Pidato PBB Presiden, berkewadjiban ,,Membangun dunia kembali", mentjapai suatu dunia tanpa imperialisme.

Kedewasaan kita diukur dari tjara pendekatan, tjara pemahaman dan tjara pemetjahan terhadap segala persoalan. Manipol dan perperintjiannja, memberikan kepada kita sekalian dewasa ini suatu pegangan jang sebaik²nja untuk mendekati soal², memahami soal², memetjahkan soal². Oleh sebab itu kedewasaan Republik

kita akan diukur dari tepat-tidaknja ia *melaksanakan* Manipol. Untuk waktu² sesudah sidang pertama MPRS ini, soal jang sangat penting, jang menentukan adalah soal *pelaksanaan* dan soal *pelaksana²*. Bukankah Presiden Sukarno sering berkata : achirnja manusialah jang menentukan !

Belum pernah persatuan nasional dinegeri kita seluas dan sebaik sekarang. Persatuan nasional, jang pada pokoknja — semua kekuatan Republiken ber-sama², bahu-membahu, tanpa kaum reaksioner, bahkan melawan kaum reaksioner. Hanja ada dua kemungkinan bagi persatuan ini : berhasil atau gagal. Sekalipun, revolusi akan berdjalan terus, lepas dari berhasil-tidaknja persatuan jang sekarang ini. Tetapi selama setahun lebih sedjak Manipol ini, sudah ternjata kita tidak hanja mendjumpai bajangan², tetapi djuga tjahaja². Djika rentjana Ketetapan tentang Garis² Besar daripada Haluan Negara jang disusun oleh Komisi Manipol dan sudah disetudjui oleh pimpinan MPRS ini kita terima dengan suara bulat dan hati bulat, ini berarti terbitnja tjahaja jang hebat, tjahaja persatuan segenap kekuatan nasional, dengan Nasakom sebagai porosnja dan Manipol sebagai landasannja, tjahaja jang akan menerangi djalannja Republik kita, djalannja Kemerdekaan Nasional dan Demokrasi jang dengan melikwidasi ekonomi kolonial dan keterbelakangan feodal, seperti dikatakan Presiden Sukarno dalam „Amanat Pembangunan"nja, „setelah beberapa kali pembangunan semesta berentjana berdjalan, misalnja sesudah lima atau enam kali, maka hendaknja..... telah memasuki atau minimal mendekati masjarakat adil dan makmur".

Mari kita kembangkan tjahaja, agar terusir segala kegelapan !

Sekian saudara Ketua dan Madjelis jang mulia, terimakasih atas perhatian saudara².

Ir. Sakirman

Sjarat² pokok pelaksanaan pembangunan

Saudara Ketua dan Pimpinan jang terhormat,
Rapat jang mulja,

Beberapa waktu jang lalu Sidang pertama MPRS kita ini telah mentjatat suatu hasil gemilang dan bersedjarah berupa „Ketetapan MPRS No. I Tentang Manipol Sebagai Garis Besar Haluan Negara."

Sekarang MPRS sedang menghadapi saat² jang penting pula, jang akan membuktikan dapat atau tidaknja MPRS memenuhi harapan PJM Presiden Sukarno dan harapan² massa Rakjat, jaitu Menetapkan Garis² Besar Pola Pembangunan jang harus sesuai dengan Garis² Besar Haluan Pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Sukarno dan sudah diterima oleh MPRS. Saja jakin dan pertjaja sepenuhnja bahwa MPRS tidak akan mengetjewakan harapan² itu. *Sebagai wakil golongan Komunis, dengan ini saja menjatakan dapat menjetudjui pada umumnja „Rantjangan Ketetapan II MPRS Tentang Garis² Besar Pola Pembangunan Semesta Berentjana" ini, jang dalam tempo beberapa hari sadja sudah dapat kita selesaikan berkat semangat gotongrojong dan kebidjaksanaan Pimpinan MPRS, berkat keaktifan jang luarbiasa daripada Komisi² dan Sub²-Komisi, berkat kerdjasama jang baik antara semua golongan² dan kelompok² dalam MPRS. Semuanja ini adalah sukses dari prinsip kegotongrojongan jang djudjur dan ichlas.*

Atas ini semua saja menjatakan djuga terimakasih dan penghargaan saja dan golongan saja jang setinggi²nja kepada semua jang telah ambil bagian dalam pekerdjaan besar ini.

Masalah pembangunan sebetulnja bukanlah suatu masalah baru bagi kita. Terutama semendjak tertjapainja persetudjuan KMB, golongan² jang berkuasa senantiasa mentjoba untuk memetjahkan masalah pembangunan menurut konsepsi mereka masing². Akan tetapi usaha itu ternjata gagal, sehingga keadaan ekonomi Indonesia sekarang belum djuga menundjukkan kemadjuan² jang berarti dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun jang lalu. Rakjat banjak, terutama kaum buruh dan kaum tani dan golongan produsen ketjil masih tetap meringkuk dibawah penghisapan kaum monopoli asing dan tuantanah, dan oleh karena itu beban hidup mereka se-hari² adalah sangat berat, dajabeli mereka semakin merosot dan bersamaan dengan itu harga² barang² kebutuhan pokok se-hari² semakin membubung tinggi dan padjak² langsung atau tidaklangsung semakin bertambah berat. Diatas tumpukan derita Rakjat itu bertachtalah segundukan ketjil oknum² jang sudah menikmati hidupnja, dan jang menurut istilah Presiden Sukarno — sudah „binnen" kekajaannja, karena telah berhasil „membangun ekonominja diri-sendiri" atas kerugian negara dan Rakjat atau telah berhasil melajani kebutuhan dan kepentingan² „pembangunan" ekonomi modal besar asing.

Dalam hubungan ini saja atasnama golongan Komunis menjatakan penghargaan kami jang wadjar atas kebidjaksanaan Presiden Sukarno jang telah berhasil menjusun suatu dokumen penting, jaitu *Garis² Besar Haluan Pembangunan seperti jang telah diamanatkan kepada Sidang Pleno DEPERNAS tanggal 28 Agustus 1959.*

Dalam amanat ini jang terkenal dengan Amanat Presiden Tentang Pembangunan Semesta Berentjana atau disingkat Amanat Pembangunan Presiden (APP),

dinjatakan setjara ringkas tudjuan pembangunan dalam hubungan dengan tudjuan djangka djauh Revolusi Agustus 1945. Jaitu membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia jang meliputi masjarakat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke jang bebas dari penghisapan dan penindasan imperialisme, feodalisme dan kolonialisme, menudju tertjapainja masjarakat jang adil dan makmur, tanpa penindasan dan penghisapan, masjarakat sosialis Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.

Dalam Amanat Pembangunan Presiden itu djuga ditundjukkan dengan djelas bahwa garis perdjuangan untuk mentjapai tudjuan itu jalah pembangunan semesta dan berentjana jang ber-tahap² dizaman peralihan, dengan mengikis dan membinasakan sisa² ekonomi kolonial dan ekonomi feodal untuk meletakkan kemungkinan pembangunan ekonomi nasional jang berdiri sendiri dan tidak tergantung.

Dan jang tidak kurang pentingnja dari ini semua jalah keterangan jang dibeberkan dalam APP itu tentang sebab² pokok mengapa usaha pembangunan dimasa jang lampau itu selalu menemui kegagalan. Dalam keterangan itu terutama ditekankan peranan jang djahat dari kaum imperialis asing jang selalu berusaha turut tjampurtangan dalam urusan dalamnegeri negara² setengah-djadjahan dan negara² jang baru merdeka. APP al. menjatakan: „Sesudahnja selesai perang dunia kedua, maka timbullah dua 'matjam stabilisasi' didunia ini, jaitu stabilisasi kapitalisme dan stabilisasi Sosialisme. Ketenangan jang ditimbulkan oleh stabilisasi ini hanja untuk sementara sadja, karena kedua belah fihak selalu bertentangan satusamalain. Kalau stabilisasi jang ditudjukan untuk kepentingan finans-kapital mengandung pertentangan-pertentangan diantara sesama negara-negara imperialis dan diantara negara-negara imperialis dengan Rakjat² djadjahan, maka stabilisasi Sosialisme mengandung konsolidasi kedalam dan keluar.

Untuk menghadapi stabilisasi Sosialisme ini, maka negara² imperialis dengan berbagai matjam djalan berusaha mempengaruhi negara² setengah-djadjahan dan jang baru merdeka, terutama dengan menanam modal monopolinja dan mengikatnja dengan pakta² militer jang tidak boleh tidak menimbulkan kerugian besar dipihak negara setengah-djadjahan atau jang baru mendapatkan kemerdekaannja itu. Timbullah kekatjauan dibidang ekonomi, politik dan sosial dan hal ini membawakan kesempatan bagi negara² imperialis untuk mengadakan tjampurtangan jang langsung terhadap persoalan² dalamnegeri dari negara² tersebut." (Buku I, Djilid 1 halaman 28).

Keterangan jang begitu gamblang dalam APP itu tentang masalah turut tjampurtangannja negara asing dalam urusan dalamnegeri negara² setengah-djadjahan dan jang baru merdeka, bukan sadja telah memperkaja pengetahuan kita tentang sebab² kenapa selalu timbul kekatjauan dibidang ekonomi, politik dan sosial di Indonesia, akan tetapi djuga tentang arti sesungguhnja daripada apa jang disebut ,,perang dingin", tentang perbedaan pokok antara watak negara² Sosialis dengan watak negara² imperialis dan praktek² negara² imperialis itu di Indonesia. Kalau dulu masih ada orang jang mengira bahwa hanja Belanda sadjalah jang merupakan bahaja imperialis bagi Indonesia, maka sekarang sudah makin mendjadi djelas bahwa imperialisme di Indonesia jalah setiap bentuk investasi modal monopoli asing jang bertjokol di Indonesia. Pengalaman² di Kuba, Venezuela, Laos, Irak, Libanon, Mesir, Kongo, dll. membuktikan kebenaran hal ini.

Ini perlu saja kemukakan, karena dalam menindjau Rantjangan Pola Pembangunan DEPERNAS setjara pokok, adalah penting sekali diketahui sampai dimana Rantjangan itu telah bisa memenuhi sjarat anti-imperialisme, disamping sjarat anti-feodalisme, guna mendjawab pertanjaan apakah Rantjangan Pola Pembangunan DEPERNAS sudah dapat menggunakan pengalaman jang lampau itu sebagai peladjaran jang berguna bagi suksesnja pembangunan dikemudian hari.

Pada kesempatan ini saja ingin mengemukakan pendapat golongan Komunis bahwa Rantjangan Pola Pembangunan DEPERNAS kurang berwatak anti-imperialisme dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Malahan sementara orang telah berhasil menjelibkan pengertian tentang bentuk baru investasi modal asing jaitu ,,production share", ,,Argentine Pattern", ,,joint venture", ,,joint enterprise", dll. se-olah² bentuk ini bukanlah suatu bentuk investasi modal asing. Tepat sekali kesimpulan Komisi Keuangan dan Pembeajaan jang menjatakan bahwa Projek B terlalu menggantungkan pelaksanaannja kepada exploitasi oleh modal asing.

Jang mendjadi tjiri pokok daripada modal imperialis bukanlah bentuk formilnja, akan tetapi adalah hakekat daripada modal imperialis itu jang menghisap Rakjat dan kekajaan alam Indonesia serta mengalirkan setiap tahunnja keuntungan jang ber-limpah² ke-negara² mereka. *Exploitasi ,,production share" jang berlangsung untuk waktu jang tidak terbatas adalah tidak kurang kedjamnja dibandingkan dengan exploitasi penanaman modal asing setjara klasik, dan begitupun halnja dengan ,,Argentine Pattern", ,,joint venture", dan ,,joint enterprise".* Djelaslah, bahwa ,,risiko" daripada ,,production share" adalah sangat besar dan prinsipiil, karena — dengan mengikuti angka² tentang sumber pembiajaan dilapangan pertambangan minjak dalam Buku I, Djilid III, halaman 650, — setelah tahun ke-enam, akan mengalir extra profit jang me-limpah² keluarnegeri, jang tidak kurang besarnja dibandingkan dengan keuntungan jang didapat dari investasi bentuk klasik. ,,Production share" adalah sangat merugikan Rakjat Indonesia, *ketjuali djika ,,production share" itu merupakan bentuk kredit jang dibajar dengan hasil produksi, jang berbunga rendah, tanpa sjarat² jang mengikat se-*

perti jang dinjatakan dalam Amanat Pembangunan Presiden (Buku I, Djilid I halaman 29 dan 35).

Berhubung dengan itu, sebetulnja adalah lebih tepat, apabila MPRS mengambil keputusan tentang masalah penggunaan modal asing itu sbb.: menolak dengan tegas penanaman modal asing baru, menggerowoti modal monopoli asing jang sudah ada, menerima bantuan modal luarnegeri dalam bentuk pindjaman tanpa sjarat^2 politik dan militer dan menjerahkan kepada kebidjaksanaan PJM Presiden dan DPR-GR penggunaan modal luarnegeri jang baru dalam bentuk^2 lainnja.

Mengenai sifat anti-feodalisme daripada Rantjangan Pola DEPERNAS sesudah disempurnakan oleh Komisi^2 MPRS jang bersangkutan dapat dikatakan memenuhi sjarat^2 minimum, asalkan dilaksanakan dengan konsekwen, sembojan *„Tanah untuk kaum tani jang menggarap tanah"*.

Sampailah saja sekarang kepada soal^2 jang tidak kurang pentingnja daripada soal^2 perentjanaan, jaitu soal^2 jang berhubungan dengan sjarat^2 pelaksanaan Pola Pembangunan. Masalah pelaksanaan ini adalah suatu masalah jang penting dan vital, sebab, betapapun baiknja sesuatu rentjana diatas kertas, namun ia akan tetap tinggal rentjana sadja djika tidak diikuti oleh tindakan^2 pelaksanaan jang demokratis dan revolusioner. Lebih^2 djika rentjana itu an sich mengandung kelemahan^2 dan kekurangan^2.

Per-tama^2 harus djelas bagi kita bahwa sasaran pokok daripada pembangunan tahap I ini jalah memper-siapkan dasar^2 untuk membangun ekonomi nasional jang berdiri sendiri dan tidak tergantung, dengan mengikis dan membinasakan sisa^2 ekonomi kolonial dan ekonomi feodal. Untuk ini maka dalam 3-4 tahun jang akan datang ini, seharusnja dilakukan politik perubahan agraria atau „landreform" setjara konsekwen jaitu melaksanakan sembojan „tanah untuk kaum tani jang menggarap tanah", supaja hasil produksi pertanian

meningkat, supaja kaum tani memiliki dajabeli jang lumajan dan dengan demikian terbentuk pasaran bagi barang^2 industri kita. Selain landreform, djuga persiapan^2 pembangunan industri sebagai langkah pertama untuk dalam tahun^2 kemudian melakukan industrialisasi, dengan industri berat dan industri^2 vital lainnja, sebagai sektor ekonomi negara jang mempunjai posisi komando atas perkembangan kehidupan ekonomi seluruh negeri.

Bersamaan dengan usaha melaksanakan „landreform" setjara konsekwen itu, perlu diambil tindakan^2 untuk menggerowoti kekuasaan modal besar asing bukan Belanda jang sudah ada, jaitu CALTEX dan STANVAC, dan perusahaan^2 perkebunan modern; menasionalisasi semua modal Belanda jang masih ada di Indonesia. Dengan tindakan^2 ini maka akan dapat dilakukan politik moneter jang stabil guna mendjamin kelantjaran produksi, perdagangan dan peredaran uang setjara berentjana, sehingga dapat ditjegah merosotnja dajabeli Rakjat dan merosotnja nilai rupiah kita.

Faktor lainnja jang sangat penting untuk mendjamin sukses dan lantjarnja pembangunan jalah faktor turutsertanja massa Rakjat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dalam berbagai matjam bentuk. Dengan perantaraan wakil^{2}nja, Rakjat sekarang sudah turutserta dalam usaha memberikan nasehat^2 kepada PJM Presiden, lewat DPA; dalam pekerdjaan legislatif lewat DPR-GR, dalam pekerdjaan membuat rantjangan pola pembangunan lewat DEPERNAS, dan dalam usaha menentukan garis^2 besar haluan negara dan garis^2 besar pola pembangunan lewat MPRS. Berkat dilaksanakannja prinsip kegotongrojongan, jaitu prinsip kerdjasama semua tenaga^2 revolusioner, dengan NASAKOM sebagai porosnja tanpa mengurangi arti golongan^2 revolusioner lainnja, maka badan^2 tersebut sampai sekarang telah membuktikan hasil^2 jang tidak mengetjewakan.

Mudah dimengerti, bahwa turutsertanja wakil² Rakjat dalam pembangunan semesta berentjana adalah tidak tjukup lewat badan² itu sadja. Sebab dengan tidak mengurangi wewenang MPRS, DPA, DPR-GR dan DEPERNAS, maka jang terpenting bagi Rakjat sekarang adalah masalah kekuasaan politik gotongrojong jang konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme, jang bidjaksana, flexible dan tangkas.

Tanpa adanja kekuasaan politik jang demikian ini, maka tidak akan mungkin melaksanakan pembangunan semesta dan berentjana jang dapat memenuhi sjarat² dalam Manipol dan perintjiannja serta APP. Kita harus beladjar dari pengalaman² jang lampau, bahwa pembangunan jang tidak tegas² anti-imperialisme dan anti-feodalisme akan hanja berakibat menumpuknja kekajaan Indonesia pada segelintir kaum kapitalis besar asing, dan segolongan ketjil oknum² jang oleh Presiden Sukarno dalam Amanatnja tanggal 27 Djanuari 1960 di Istana Negara disebut sebagai „pentjoleng², korup-tor, ketidak-tegasan etc, etc, disemua bidang, daripada bidang sivil sampai kebidang militer" (Brosur DJAREK, halaman 31).

Adalah sangat tidak logis dan tidak masukakal, apabila NASAKOM jang sudah diterima untuk MPRS, DPA, DPR-GR dan DEPERNAS, masih djuga disangsikan untuk diterima dalam badan kekuasaan eksekutif didaerah dan dipusat. Lebih² djika diingat bahwa MPRS, Badan² Eksekutif, DPA, DPR-GR dan DEPERNAS adalah semuanja, seperti dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam Sidang Pembukaan DPR-GR tanggal 16 Agustus jang lalu, merupakan alat Revolusi jang sama pentingnja dan mendjalankan tugas jang satu dan sama pula jaitu menjelesaikan Revolusi Agustus 1945 jang belum selesai ini.

Dilihat dari sudut dasar Negara Pantjasila jang berarti menurut keterangan Bung Karno dalam „Lahirnja Pantjasila", djika diperas, mendjadi Trisila, dan djika

diperas lagi mendjadi Ekasila atau Gotongrojong, djuga tidak ada alasan samasekali untuk mendiskriminasikan kekuatan² demokratis dan revolusioner dengan NASAKOM sebagai porosnja dalam hubungan dengan pembentukan semua badan eksekutif. Sebab, kata Presiden Sukarno dalam pidatonja didepan rapat raksasa di Surabaja tanggal 30 Oktober jang lalu : „..... *Kalau Pantjasila tulen harus setudju NASAKOM*".

Dan selandjutnja, dalam Amanatnja „DJAREK", tanggal 17 Agustus 1960 Presiden mengatakan : *„Dan kita ingin menang. Dan kita toh harus menang? Karena itu saja selalu mengandjurkan Gotongrojong djuga dilapangan politik. Karena itu Manifesto Politik — USDEK bersemangat kegotongrojongan-bulat, djuga dilapangan politik. Karena itu di Solo beberapa hari jang lalu, saja tegaskan perlunja persatuan dan kegotongrojongan antara golongan² Islam, Nasionalis dan Komunis. Ini adalah konsekwensi politik terpenting bagi semua pendukung Manifesto Politik dan USDEK, suatu konsekwensi politik jang tidak plintat-plintut dan plungkar-plungker bagi semua orang jang setia pada Revolusi Agustus 1945.*

Djika tidak, maka semua omongan tentang Gotongrojong, Manifesto Politik, USDEK, Front Nasional, 'setia kepada Revolusi Agustus 1945', dan lain sebagainja adalah omongkosong, 'lipservice' belaka.

Salahsatu tjiri daripada orang jang betul² revolusioner adalah satunja kata² dengan tindakan. Orang revolusioner jang tidak bersatu dalam kata² dan perbuatan adalah orang revolusioner gadungan". (Brosur DJAREK, halaman 27).

Marilah kita selandjutnja dengan penuh kedjudjuran dan bebas dari perasaan purbasangka, merenungkan djiwa dan semangat daripada suatu bagian jang sangat penting daripada Amanat Presiden Tentang Pembangunan tanggal 28 Agustus 1959 : *„Dalam bidang politik, Rakjat Indonesia tidak bosan² terusmenerus meng-*

usahakan penggalangan persatuan nasional; Rakjat Indonesia sekarang harus menjiapkan diri untuk melaksanakan ide demokrasi terpimpin sebagai pelaksanaan Konsepsi Presiden jang ditjetuskan pada tanggal 21 Februari 1957". (Djilid I, halaman 57).

Dan apakah sebenarnja isi daripada Konsepsi Presiden jang sudah sangat terkenal itu ? *Isinja jalah tidak-lain daripada pembentukan suatu Kabinet Gotongrojong jang didalamnja duduk wakil partai² dan fraksi² dalam Parlemen jang tjukup mempunjai kiskosen, dan pembentukan Dewan Nasional, jang sekarang sudah mendjelma mendjadi Dewan Pertimbangan Agung.*

Saudara Ketua, dan Pimpinan jang terhormat.

Saja kemukakan semuanja ini, chususnja tentang soal badan eksekutif Gotongrojong ini, adalah se-mata² karena kami ingin Pola Pembangunan tahapan I ini dapat dilaksanakan. Tanpa persatuan nasional jang kuat, tanpa Gotongrojong jang sungguh², tidak ada soal penting dan pokok bisa dipetjahkan dinegeri kita.

Saja kira tidak ada seorangpun diantara kita ini jang suka diberi predikat ,,revolusioner gadungan", lebih² karena kita tahu, bahwa kita semua ini telah ditempatkan disini sebagai ,,putera² dan puteri² jang terbaik" daripada seluruh bangsa dan tanahair Indonesia.

Oleh karena itu agar kita tidak mendapat gelar revolusioner gadungan, dan agar kita bisa membuktikan bahwa kita memang satu dalam kata² dan tindakan, dan membuktikan bahwa kita benar² adalah putera² dan puteri² Indonesia jang terbaik, maka sejogianja Amanat Pembangunan Presiden itu, kita laksanakan dengan lapang dada, didjiwai semangat gotongrojong jang murni, semangat mempersatukan atau ,,samenbundelen" semua kekuatan² revolusioner disemua bidang pembangunan dan Revolusi, tanpa mendiskriminasikan bidang jang satu terhadap bidang jang lain.

,,Samenbundeling" daripada semua kekuatan² revolusioner, ketjuali harus dihimpun dalam badan², dan

alat² kekuasaan negara sebagai dikatakan oleh PJM Presiden Sukarno dalam Manipol, Amanat ,,Djalannja Revolusi Kita" dan Amanat Pembangunan Presiden (APP), djuga harus dihimpun dalam front persatuan nasional jang demokratis dan anti-imperialisme. Pendirian Presiden Sukarno ini, adalah tepat sekali. Sebab ibarat orang harus berdjalan dengan dua kaki, maka Revolusi seharusnja djuga ,,berdjalan dengan dua kaki", kaki jang satu jalah badan² dan alat² kekuasaan negara, dan kaki lainnja jalah front persatuan nasional jang mendjadi transmisi atau hefboom antara Kepala Negara dan masjarakat. Tanpa adanja ,,dua kaki jang dibangun menurut prinsip kegotongrojongan berporoskan NASAKOM", tidaklah mungkin Revolusi Agustus 1945 diselesaikan dengan sukses.

Front Nasional sebagai sjarat mutlak untuk dapat membikin suksesnja pembangunan dan suksesnja penjelesaian Revolusi Agustus 1945, barulah bisa dikatakan dapat memenuhi tugasnja apabila mampu mendjalankan aksi² massa revolusioner, untuk mentjapai sasaran² pembangunan Revolusi setjara tepat. Akan tetapi aksi² ini baru dapat diadakan, apabila Rakjat dapat berkumpul dan berapat untuk mempersatukan pendapat dan pikirannja tentang pelaksanaan daripada soal² pokok Revolusi dan Pembangunan seperti jang diuraikan dalam Manipol dan perintjiannja serta Amanat Pembangunan Presiden (APP). Tanpa adanja kesempatan bagi Rakjat untuk membitjarakan dan mendiskusikan masalah² pokok Revolusi dan Pembangunan, tidaklah mungkin Rakjat melakukan kesatuan tindakan², atau kesatuan aksi² revolusioner.

Oleh karena itu sjarat jang mutlak bagi perkembangan gerakan front persatuan nasional adalah terdjaminnja hak² demokratis dan kebebasan² Rakjat. Sudah tentu di-daerah² jang belum aman sepenuhnja, pelaksanaan hak² dan kebebasan demokratis ini harus diatur dengan suatu kebidjaksanaan jang chusus, se-

suai dengan keadaan setempat. Dan sudah terang djuga bahwa musuh2 revolusi, golongan2 kepalabatu jang menentang Manipol dan garis2 besar haluan pembangunan, termasuk suratkabar2 jang mendjadi terompet mereka itu, harus ditjabut hak2nja untuk merusak fikiran dan persatuan Rakjat.

Dengan mendjamin hak2 serta kebebasan demokratis Rakjat, dan terbentuknja suatu front persatuan nasional jang luas dan kuat, maka akan terbukalah djuga kemungkinan2 bagi Rakjat untuk melakukan pengawasan terbuka atas djalannja pelaksanaan pembangunan, dengan memberikan kritik2 jang konstruktif setjara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hubungan ini, maka sebetulnja sudah pada tempatnja apabila saja atasnama golongan Komunis mengadjukan pertimbangan kepada Peperti mengenai penindjauan berlakunja Undang2 Keadaan Bahaja supaja disesuaikan dengan keadaan setelah dimulai pelaksanaan pembangunan semesta berentjana ini. Hanja Rakjat jang tidak tertekan perasaan dan fikirannja bisa berbuat banjak untuk melaksanakan ketetapan2 jang sudah diambil oleh MPRS.

Demikianlah, sjarat2 pokok pelaksanaan pembangunan untuk mentjegah agar tudjuan pembangunan dan perspektif Revolusi Agustus, jaitu pembentukan masjarakat sosialis Indonesia, tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, dapat dibelokkan mendjadi „sosialisme" dengan penghisapan dan penindasan oleh kaum imperialis asing dan tuantanah.

Sekali lagi saja njatakan, bahwa golongan Komunis menerima Ketetapan MPRS tentang Garis2 Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969.

Njono

Soal kesedjahteraan dalam Sidang MPRS

Sidang MPRS jang mulia,

Setelah mempeladjari Rantjangan Ketetapan MPRS No. II, chusus mengenai bagian ketentuan umum bidang kesedjahteraan beserta lampiran2nja, selaku Ketua Komisi „B" (Bidang Kesedjahteraan) dapatlah saja melaporkan, bahwa Rantjangan Ketetapan MPRS No. II itu adalah sesuai dengan perasaan2, fikiran2 dan perumusan2 pendapat Komisi „B".

Komisi „B" jang beranggotakan 60 orang terbagi atas 4 sub2 Komisi, jaitu Sub Komisi Kesehatan jang diketuai oleh Kolonel Dr. Wonojudo dengan 2 orang Wakil Ketua, Sub Komisi Perumahan jang diketuai oleh Prof. Dr. N. Drijarkara dengan 2 orang Wakil Ketua, Sub Komisi Kesedjahteraan Sosial jang diketuai oleh R. Z. Fananie dengan 3 orang Wakil Ketua dan Sub Komisi Kesedjahteraan Buruh, Tani dan Nelajan jang diketuai oleh Sudarsono dengan 2 orang Wakil Ketua.

Permusjawaratan dalam rapat2 Komisi dan Sub2 Komisi jang dilangsungkan sedjak tanggal 16 s/d 25 November 1960 selalu diliputi oleh suasana gembira, bersatu dan penuh dengan semangat bekerdja tjepat, tidak tele2, tetapi tidak serampangan. Suasana pimpinan adalah kompak dan semua hasil2 Komisi diputuskan dengan musjawarah dan suara bulat.

Hasil2 pokok Komisi „B" jalah berupa Perumusan Pendapat Komisi „B" tentang Garis2 Besar Pemba-

ngunan Bidang Kesedjahteraan Rakjat. Dalam Perumusan Pendapat Komisi ,,B" ini diputuskan :

1. Menjetudjui pada umumnja Garis Besar Pembangunan Bidang Kesedjahteraan Rakjat sebagaimana tersebut dalam Rantjangan Dasar Undang2 Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, Buku ke-Satu, Djilid III, dengan memadjukan saran2 jang bersifat penambahan atau pengurangan, dan
2. Menjerahkan pelaksanaannja dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dengan dimana perlu membawanja ke Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Sesuai dengan petundjuk terachir Pimpinan MPRS, maka saran2 jang telah diputuskan dengan suara bulat oleh Komisi ,,B" telah di-bagi2 oleh Pimpinan Komisi dalam Lampiran2 A dan B, tanpa Lampiran C.

Mengenai pengertian umum kesedjahteraan Rakjat, Komisi ,,B" berpendapat, bahwa Rakjat dapat disebut sedjahtera, apabila Rakjat tidak hanja terdjamin mendapatkan pekerdjaan sesuai dengan bakatnja dan memperoleh hasil pekerdjaan jang lajak guna memenuhi keperluan hidup se-hari2 bagi dirinja sendiri beserta keluarga, tetapi djuga harus mendapatkan djaminan hari tua, sehingga tidak hidup dalam ketakutan dan kemelaratan, djika tak berdaja lagi untuk mentjari nafkahnja.

Bidang Kesedjahteraan meliputi bidang2 kesehatan, perumahan beserta air minum dan penerangannja, kesedjahteraan sosial dan kesedjahteraan buruh, pegawai, tani dan nelajan.

Dibidang kesehatan, Komisi ,,B" berpendapat, bahwa dalam pendidikan tenaga kesehatan, supaja disamping pendidikan para dokter, dalam waktu jang singkat diutamakan pendidikan para-medisch jang selekasnja dapat dikerdjakan di-pelosok2. Masalah2 lain jang dianggap penting oleh Komisi ,,B" jalah masalah penggunaan dan penjebaran tenaga kesehatan pemerintah maupun

swasta setjara adil dan merata dan masalah obat2an supaja mudah didapat dengan harga murah.

Dibidang perumahan, Komisi ,,B" menegaskan, bahwa dalam soal perumahan keaktifan Pemerintah hendaknja djanganlah hanja berupa pemberian fasilitet, melainkan Pemerintah hendaknja djuga membangun rumah2, baik untuk disewakan maupun untuk didjual, terutama di-tempat2 industri negara. Selandjutnja dikemukakan, supaja bantuan2 untuk pembangunan perumahan disalurkan melalui berbagai djalan dengan tjara2 jang mudah, misalnja melalui koperasi pembangunan perumahan, djawatan perumahan Rakjat, bank perumahan, usaha swasta nasional dllnja.

Mengenai penerangan, Komisi ,,B" menjetudjui usaha perluasan elektrifikasi oleh negara. Tetapi disamping itu, supaja distribusi minjak tanah diusahakan setjara merata, tjepat dan murah.

Dibidang kesedjahteraan sosial, Komisi ,,B" memadjukan satu prinsip, supaja usaha2 kesedjahteraan sosial oleh Pemerintah diperluas, disamping itu hendaknja Pemerintah membantu pembangunan usaha2 swasta nasional, baik jang sudah ada, maupun jang akan didirikan dalam bidang kesedjahteraan sosial. Untuk mentjegah timbulnja dan mendjalarnja penjakit masjarakat, supaja Pemerintah melarang dengan perundangan pengemisan, pelatjuran, perdjudian, pemadatan, perdagangan manusia, penghisapan wuker dan pergelandangan.

Dibidang kesedjahteraan buruh dan pegawai, Komisi ,,B" memusatkan perhatiannja kepada adanja satu undang2 pokok kepegawaian/perburuhan jang antara lain menghapuskan undang2 kolonial jang masih ada seperti onslagrecht no. 396/1941, menetapkan adanja satu status pegawai negeri, menghapuskan diskriminasi dilapangan perupahan, sjarat2 kerdja dan djaminan sosial dan adanja perlindungan chusus bagi buruh wanita dan buruh muda.

Dibidang kesedjahteraan tani dan nelajan, Komisi

„B" menekankan pentingnja pelaksanaan per-undang2-an jang telah ada untuk memperbaiki tingkathidup kaum tani, diantaranja pelaksanaan Undang2 Pokok Agraria, Undang2 Bagi Hasil, Undang2 penghapusan tanah partikelir, disamping itu supaja dilakukan perbaikan2 dilapangan pengkreditan, diadakan pelarangan/pengawasan se-keras2nja terhadap woeker dllnja. Chusus untuk nelajan, Komisi „B" memandang perlu adanja undang2 bagi hasil bagi nelajan.

Sidang MPRS jang mulia,

Demikian beberapa masalah pokok jang dibahas dalam bidang kesedjahteraan untuk sekedar memberikan gambaran perasaan2, fikiran2 dan perumusan2 pendapat apa jang hidup dikalangan Komisi „B" jang ternjata sudah tertjermin setjara pokok dan lengkap dalam Rantjangan Ketetapan MPRS No. II jang diadjukan oleh Pimpinan MPRS kepada kita semua.

Saja harapkan, semangat persatuan nasional jang saja alami langsung di Komisi „B" dan dalam permusjawaratan2 MPRS lainnja dapat terus berlangsung tidak hanja didalam gedung MPRS disini, djuga diluar gedung MPRS dalam melaksanakan ketetapan2 MPRS jang kita putuskan bersama dengan musjawarah dan suara bulat.

Terimakasih.

Asmu

Landreform dan industrialisasi adalah loro-loroning atunggal

Saudara Ketua Jth.
Sidang Madjelis Jang Mulia.

Atasnama kaum tani jang saja wakili, saja memperkuat penerimaan setjara aklamasi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara terhadap Ketetapan No. II/MPRS/1960 Tentang Garis2 Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969.

Ketetapan No. II ini meletakkan kewadjiban pada Pemerintah untuk melaksanakan kebidjaksanaan politik diberbagai bidang sesuai dengan Garis2 Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana ketetapan MPRS. Ketetapan No. II ini merupakan pedoman bagi Presiden/Perdana Menteri dan Rakjat Indonesia untuk mengkadji seseorang Menteri pembantu Presiden dan pedjabat lainnja dipusat dan didaerah tentang kesetiaannja terhadap revolusi, negara dan Rakjat serta ketjakapan bekerdjanja.

Dalam Ketetapan No. II ditegaskan bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berentjana ini adalah suatu pembangunan dalam m a s a p e r a l i h a n jang bersifat menjeluruh untuk tertjapainja masjarakat sosialis Indonesia, dimana tidak terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia. Ini berarti bahwa sedjak dimulainja pelaksanaan pembangunan sudah

harus dirintis djalan pembebasan bagi bagian terbesar Rakjat Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani, jang sampai pada saat ini masih mengalami ber-bagai² bentuk penindasan dan penghisapan.

Saja menjambut dengan gembira ketetapan jang menjatakan bahwa sumber pembiajaan pembangunan nasional berentjana ini per-tama² harus diusahakan atas dasar kekuatan dalamnegeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) jang progresif, dengan sedjauh mungkin tidak menambah beban Rakjat, tanpa mentjantumkan perlunja penanaman modal asing. Penanaman modal asing, dalam bentuk apapun djuga, apabila ia mendjalankan transfer keuntungan, akan berarti pemerasan terhadap keringat Rakjat dan kekajaan nasional negeri kita untuk kepentingan asing.

Ketetapan No. II ini menundjukkan djalan pembangunan nasional semesta setjara tepat. Terutama karena menetapkan bahwa „Landreform adalah bagian mutlak daripada revolusi Indonesia dan basis pembangunan semesta". Dan selandjutnja menetapkan bahwa „tanah sebagai alat produksi tidak boleh didjadikan alat penghisapan".

Ini adalah sesuai dengan amanat PJM Presiden Sukarno jang selandjutnja menegaskan bahwa „Tanah Untuk Tani". „Tanah Untuk Mereka Jang Betul² Menggarap Tanah" („Djarek" halaman 35). Dengan melaksanakan landreform berdasar prinsip² jang diamanatkan oleh PJM Presiden Sukarno, akan tertjiptalah sjarat² untuk membangkitkan kegairahan bekerdja kaum tani. Akan terdapatlah sjarat² untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi pangan jang sekaligus meningkatkan dajabeli kaum tani jang merupakan konsumen terbesar dinegeri kita. Ini semua akan membuka djalan guna meningkatkan taraf kebudajaan dan dajatjipta kaum tani, sehingga masjarakat kita sanggup memikul tugas mengembangkan industri

dinegeri kita. Dengan melaksanakan landreform berdasarkan prinsip² jang diamanatkan oleh Presiden Sukarno, terbuka djalan untuk mengembangkan industri dinegeri kita. Tanpa landreform sematjam itu, tidak mungkin dilaksanakan pembangunan industri dinegeri kita. Sama halnja dengan revolusi tidak dapat menang tanpa kaum tani. Tepat sekali pernjataan Presiden Sukarno jang menandaskan bahwa „Gembar-gembor tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masjarakat Adil dan Makmur, Amanat Penderitaan Rakjat, tanpa melaksanakan Landreform, adalah gembar-gembornja tukang pendjual obat dipasar Tanahabang atau di Pasar Senen". („Djarek" halaman 34). Selandjutnja untuk memenuhi kebutuhan kaum tani dan Rakjat pada umumnja diperlukan industrialisasi. Landreform dan industrialisasi satu sama lain tidak dapat di-pisah²kan, lorolorong atunggal.

Saja mengharap agar dalam melaksanakan pembangunan nasional semesta berentjana tahapan pertama ini, Pemerintah benar² memegang teguh garis tiga anti', jaitu anti-liberalisme, anti-imperialisme dan anti-feodalisme, serta melaksanakan landreform dan industrialisasi, sesuai dengan Ketetapan MPRS ini.

Saudara Ketua Jth.

Sidang Madjelis Jang Mulia.

Dalam Ketetapan No. II ini beserta lampirannja telah tjukup dirumuskan prinsip² jang dapat meringankan beban penghidupan serta projek² jang dapat memenuhi kebutuhan jang paling mendesak dari massa Rakjat, termasuk kaum tani. Pelaksanaan prinsip² dan projek² itu akan sangat membantu Pemerintah dalam mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) dalamnegeri. Pembebasan kaum tani dari penghisapan feodal dan pemberian tanah kepada kaum tani, akan mendorong kaum tani mengambil bagian aktif dalam pembangunan nasional semesta. Tetapi dengan itu sadja belumlah tjukup. Guna membangkitkan dan mengorga-

nisasi kaum tani untuk setjara sedar mengambil bagian aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional semesta, diperlukan kebebasan^2 demokratis. Dengan mendjamin bumi (tanah) dan demokrasi, tidak dapat diragukan lagi, Pemerintah akan dapat menarik kaum tani untuk mengambil bagian aktif dan memberikan andil jang tidak terbatas dalam pelaksanaan pembangunan nasional semesta. Tetapi, djika tanpa bumi dan demokrasi bagi kaum tani, kita terpaksa pesimis terhadap pelaksanaan Garis^2 Besar Pola Pembangunan jang sudah kita terima ini.

Achirnja, Saudara Ketua Jth, saja menjampaikan penghargaan se-besar^{2}nja kepada segenap anggota MPRS Jth, jang telah memenuhi harapan Rakjat jang diamanatkan oleh PJM Presiden dalam pembukaan Sidang MPRS jang pertama ini, bekerdja dengan tjepat dan tepat. Ini adalah berkat kerdjasama jang baik dari segenap kekuatan nasional jang berintikan Nasakom dalam MPRS ini. Saja jakin, bahwa djika kerdjasama segenap kekuatan nasional berintikan Nasakom seperti kita saksikan dan alami selama Sidang^2 MPRS ini diteruskan pada tingkat pelaksanaan Garis^2 Besar Pola Pembangunan, maka pola pembangunan jang sudah kita terima bersama ini akan benar^2 mendjadi kenjataan.

Sekian dan terimakasih.

Nursuhud

Perbedaan pokok „Rentjana Pembangunan" PRRI-Permesta dengan Garis^2 Pola Pembangunan MPRS

Sdr. Ketua dan pimpinan sidang jth,
Madjelis jang mulia,

Sebagai seorang jang berasal dari Sumatera dan dari Sumatera Barat pula, jang beberapa tahun jang lalu merupakan pusat pemberontakan kontra-revolusioner PRRI, maka saja merasa sangat gembira dengan adanja Ketetapan II MPRS ini, jang ketjuali telah menerima Garis^2 Besar Pola Pembangunan Depernas, djuga telah lebih menjempurnakannja.

Kalau dimasa jang lalu kita telah memberikan djawaban pertama jang tepat terhadap pemberontakan kontra-revolusioner PRRI-Permesta berupa pukulan^2 politik dan militer jang menghantjurkan, maka Garis Besar Pola Pembangunan jang telah kita sahkan sekarang ini merupakan djawaban kedua jang tepat pula. Saja sepenuhnja membenarkan utjapan Presiden Sukarno dalam „Djalannja Revolusi Kita" jang bunjinja sbb. :

„Bahagialah Rakjat Indonesia, kalau ia nanti dengan diterimanja blueprint Depernas oleh MPRS, telah mempunjai ia punja *Pola Pembangunan Tahapan Pertama*. Bahagialah ia, karena ia, dengan adanja Pola Pembangunan itu, merasakan adanja *pimpinan ekonomis*, — merasakan adanja ekonomisch leiderschap, disamping

adanja *politiek* leiderschap jang terpantjar dalam Manifesto Politik dan Usdek" (hal. 33). Selandjutnja beliau menegaskan: „Berantakanlah nanti zoogenaamd ramalannja PRRI-Permesta jang berbunji: 'Betul mereka (PRRI-Permesta itu) kalah dibidang militer, tetapi Republiknja Sukarno nanti akan hantjur sendiri karena economic mismanagement and misleadership'. Dengan adanja blueprint Depernas itu maka *ekonomisch leiderschap* akan tergaris njata. Dan Insja Allah akan berantakan bukan sadja ramalan kaum pemberontak itu bahwa *Kita* akan hantjur, tetapi Insja Allah akan berantakan pula mereka punja *harapan*, bahwa *mereka* akan tetap berdiri. Insja Allah, bukan Republik Indonesia jang akan hantjur, tetapi PRRI-Permestalah jang akan hantjur".

Dan saja sendiri memang jakin dan pertjaja bahwa apabila rumus^2 jang mati diatas kertas sekarang ini dapat direalisasi mendjadi kenjataan^2 jang hidup dalam kehidupan-njata, maka ia benar^2 akan merupakan sjarat untuk menghantjurkan pemberontakan kontra-revolusioner itu sampai ke-akar^{2}nja.

Alasan lain jang perlu saja kemukakan disini jalah bahwa untuk kepentingan pemberontakan mereka jang kontra-revolusioner itu, kaum pemberontak dimasa jang lalu telah mengabui mata Rakjat dengan sembojan^2 kosong tentang „pembangunan semesta". Akan tetapi Rakjat Sumatera dan luar Djawa pada umumnja akan segera dapat melihat bahwa Garis^2 Besar Pola Pembangunan kita sekarang ini berbeda didalam *watak dan tudjuannja* dengan „pembangunan semesta" a la Dewan Gadjah, Dewan Banteng, Dewan Garuda dan dewan^2 partikelir lainnja. Ia berbeda dalam watak dan tudjuannja, karena „rentjana^2 pembangunan semesta" a la dewan^2 partikelir itu bukanlah „rentjana^2 pembangunan" jang bersifat anti-imperialisme dan anti-feodalisme dan oleh karena itu tidak bertudjuan untuk melikwidasi ekonomi kolonial dan ekonomi feodal jang masih bertjokol ditanahair kita, melainkan „rentjana^2 pembangunan"

jang hendak mengundang lebih banjak lagi penanaman modal asing baru dalam bentuk^{2}nja jang klasik maupun dalam bentuk^{2}nja jang baru dan jang hendak terus memupuk tuantanah^2 bumiputra. Dengan lain perkataan: pembangunan modal „productionshare", „joint enterprise", „joint venture", „Argentine pattern" dan lain^2 sebagainja. Teranglah bahwa „rentjana^2 pembangunan" mereka itu bukanlah „rentjana pembangunan" nasional, tetapi „rentjana pembangunan" seperti jang dikatakan Presiden Sukarno berorientasi kepada kepentingan modal asing. Garis^2 Besar Pola Pembangunan kita sekarang ini adalah rentjana pembangunan jang pada umumnja mempunjai watak anti-imperialisme dan anti-feodalisme, jang membedakan ia dari boleh dikata semua rentjana^2 pembangunan jang pernah ada dimasa jang lalu.

Watak anti-imperialisme daripada Garis^2 Besar Pola Pembangunan kita sekarang ini tertjermin dalam beberapa rumus dalam berbagai bidang. Dibidang produksi misalnja dalam Ketetapan II MPRS ini dalam fasal 5 ajat (2) ditegaskan bahwa tjabang^2 produksi jang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hidup Rakjat banjak, dikuasai oleh Negara, djika perlu dimiliki oleh Negara. Dibidang pembiajaan fasal 7 ajat (1) mengatakan bahwa sumber pembiajaan bagi pembangunan nasional semesta berentjana itu pertama^2 harus diusahakan atas kekuatan dalamnegeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) jang progresif, dengan sedjauh mungkin tidak menambah beban Rakjat.

Semangat daripada perumusan ini jalah pertjaja pada kekuatan diri sendiri dan tidak ingin menambah beban Rakjat dalam politik pembangunan kita. Tepat sekali bahwa dalam semua ketetapan MPRS tidak ada ditjantumkan tentang penanaman investasi modal asing. Sebaliknja, didalam MPRS terdapat semangat jang kuat untuk menolak penanaman modal asing baru dan untuk menggerowoti modal asing jang sudah ada, se-

perti mengambil-alih modal Belanda dalam BPM/Shell dan menguasai hasil devisen dari perusahaan minjak untuk didjadikan pindjaman djangka pandjang.

Demikian djuga fasal 7 ajat (2) mengatakan bahwa djika modal nasional guna pembiajaan pembangunan belum mentjukupi, maka dapat diadakan kerdjasama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan luarnegeri, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Manifesto Politik dan APP, dan harus disusun dalam per-undang²an ber-sama² dengan DPR-GR. Ini adalah sepenuhnja sesuai dengan APP jang mengatakan bahwa *„pada prinsipnja modal asing dapat diterima hanja sebagai pindjaman" (hal. 29).*

Hal² ini perlu saja kemukakan disini mengingat masih bertjokolnja modal monopoli asing di Sumatera dibidang perminjakan, seperti di Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan dan mengingat masih banjak kekajaan² jang terpendam dalam buminja jang belum digali. Sebagai terkenal Sumatera adalah pulau emas, tetapi sajang selama ini emasnja terus-menerus dibawa orang keluarnegeri.

Watak anti-feodalisme dari rentjana pembangunan kita sekarang tersimpul antara lain dalam konsiderans ajat 5 jang mengatakan bahwa sjarat pokok untuk pembangunan tata-perekonomian nasional adalah antara lain pembebasan ber-djuta² kaum tani dan Rakjat pada umumnja dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan „land-reform" menurut ketentuan² hukum nasional Indonesia, seraja meletakkan dasar² bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat jang harus diusahakan dan dikuasai oleh Negara. Selandjutnja fasal 4 ajat (3) mengatakan bahwa landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta jang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh didjadikan alat penghisapan. Ketentuan² ini ber-sama² dengan Pola Depernas ditambah dengan penegasan² jang terdapat dalam Lam-

piran A Ketetapan II MPRS, menurut hemat saja, pada pokoknja telah mentjakup pokok² fikiran Presiden Sukarno dalam Manifesto Politik, Djalannja Revolusi Kita dan APP mengenai landreform. Bukankah Presiden Sukarno telah mengatakan bahwa *„melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian jang mutlak dari revolusi Indonesia"*, dan bahwa *„revolusi Indonesia tanpa landreform adalah gedung tanpa alas"* (Djalannja Revolusi Kita, hal. 54).

Hal² ini perlu saja kemukakan disini, karena masih ada orang jang beranggapan bahwa didaerah seperti Sumatera Barat tidak terdapat pemilikan tanah setjara feodal dan bahwa disana semua tanah adalah milik kaum. Mungkin orang² ini tidak mengetahui penghidupan kaum tani jang sesungguhnja atau hanja melihat hukum² formil mengenai pertanahan jang masih berlaku. Mereka tidak mengetahui bahwa oleh karena proses perkembangan tenaga² produktif masjarakat hak-milik kaum atas tanah itu telah terpetjah-belah bahwa telah terdjadi pemindahan² milik tanah kaum jang menjebabkan terdapatnja akumulasi tanah kaum lainnja jang telah tumbuh mendjadi tuantanah². Oleh karena itu menurut pendapat saja landreform harus dilaksanakan diseluruh negeri, tidak terketjuali Sumatera Barat. Demikianlah perbedaan pokok antara „rentjana² pembangunan" a la PRRI-Permesta dengan Garis² Besar Pola Pembangunan Semesta Berentjana MPRS.

Sdr. Ketua, achirnja saja disini meminta perhatian tentang salahsatu sjarat pula daripada pelaksanaan pola pembangunan ini. Jang saja maksudkan jalah masalah pemulihan keamanan. Sedjak Presiden Sukarno dalam „Djalannja Revolusi Kita" mengumumkan bahwa pemulihan keamanan sudah akan selesai pada pertengahan tahun 1962, maka kami di Sumatera sudah meng-hitung² hari dan me-nanti² dengan penuh harapan saat pertengahan tahun 1962 itu. Djika pada saat itu keamanan masih belum selesai, maka hal itu sudah barangtentu merupakan rintangan jang besar bagi pelaksanaan ren-

tjana pembangunan semesta ini. Oleh karena itu djangka waktu jang telah ditetapkan itu hendaknja benar² dapat dipegang teguh. Dalam hubungan ini ingin saja menekankan sekali lagi tjanang jang dengan keras dilantangkan oleh Manifesto Politik bahwa pemulihan keamanan hanja bisa didjamin penjelesaiannja dalam waktu jang se-singkat²nja, apabila tetap dilaksanakan garis tanpa kompromi dalam bentuk apapun djuga dan garis mengikutsertakan Rakjat.

Karel Supit

Ketetapan² MPRS sendjata baru untuk melawan musuh² Rakjat

Sdr. Ketua jang terhormat,
Sidang Madjelis jang mulia,

Berkat kebidjaksanaan Pimpinan MPRS dan karena ke-sungguh²an bekerdja dari seluruh anggota MPRS jang didjiwai oleh semangat gotongrojong dan semangat musjawarah jang konstruktif, MPRS telah berhasil dengan gemilang menjelesaikan tugasnja mensahkan 2 dokumen penting jang peranan dan pengaruhnja akan sangat menentukan djalannja serta kehidupan Rakjat dan Republik kita di-hari² jang akan datang.

Soalnja sekarang jalah bagaimana sambutan Rakjat di-daerah² terhadap dokumen² tersebut dan bagaimana pelaksanaannja nanti.

Sebagai seorang putera Indonesia jang berasal dari Sulawesi saja dapat menjatakan bahwa dokumen tersebut ditindjau dari sudut politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan tjukup mentjerminkan kepentingan vital dari seluruh Rakjat Indonesia baik setjara Nasional, maupun setjara masing² sukubangsa.

Keputusan² tersebut mentjerminkan hasrat dan kepentingan Rakjat untuk menggalang suatu persatuan nasional jang kuat sebagai sjarat mutlak untuk menjelesaikan Revolusi Agustus sampai tertjapai sepenuhnja satu Republik Indonesia jang merdeka penuh, bersatu,

kuat, demokratis, adil dan makmur sebagai perwudjudan amanat penderitaan Rakjat.

Keputusan^2 tersebut djika dilaksanakan, djuga dapat memberikan djalan keluar dan pemetjahan bagi kesulitan^2 Rakjat Sulawesi jang sekarang sudah begitu memuntjak. Keputusan^2 jang sudah diambil MPRS dapat mendjadi landasan jang kuat bagi terwudjudnja keinginan Rakjat untuk mendapatkan persatuan, demokrasi, keamanan dan perbaikan nasib.

Oleh karena itu saja jakin pula bahwa keputusan^2 MPRS jang maha penting ini akan disambut dengan gembira dan penuh harapan oleh sebagian terbesar dari Rakjat Indonesia di Sulawesi. Ini tidak lain karena :

Dengan Ketetapan No. I dan Ketetapan No. II MPRS, Rakjat Indonesia mendapatkan sendjata baru untuk melawan musuh^2 Rakjat dan Republik jalah imperialisme, feodalisme dan kaum pemberontak kontra-revolusioner. Sebelum itu sendjata Rakjat satu^{2}nja hanjalah semangat Proklamasi 1945 dan kesetiaan kepada kesatuan bangsa, Tanahair dan Republik Indonesia.

Selama 15 tahun, imperialisme beserta kakitangan^2-nja telah tidak henti^{2}nja mendjadikan Sulawesi sasaran operasi^{2}nja dengan maksud kemudian menghantjurkan Republik Indonesia. Kita kenal gerakan Van Mook dengan Twapro serta NIT-nja, kita kenal aksi^2 Andi Azis dan Somoukil, kita kenal pemberontakan Kahar Muzakar dengan DI-nja achirnja kita kenal proklamasi Permesta oleh Sumual dan Saleh Lahade. Benar semua aksi^2 anti-Republik itu dapat diatasi berkat perdjuangan patriotik dari Rakjat Indonesia di Sulawesi dengan bantuan perdjuangan heroik seluruh Rakjat Indonesia dan APRI. Tapi dalam pada itu orang ber-tanja^2, berapa banjak sudah korban dan kerugian jang diderita oleh Rakjat dan Negara, dan kapankah segala kekatjauan dan penderitaan Rakjat akan berachir.

Dengan adanja Ketetapan MPRS No. I dan No. II itu Rakjat akan dapat dipersendjatai dengan sebuah

konsepsi politik dan sebuah konsepsi pembangunan jang djika benar^2 dilaksanakan bukan sadja akan memberikan pukulan terachir kepada sisa^2 pemberontak, tapi djuga akan mendjadi sendjata ampuh ditangan Rakjat untuk melawan segala bentuk penjelewengan jang baru.

Rakjat sedjak sekarang akan lebih mampu dan gairah meneruskan tjita^2 revolusi Indonesia karena ia sekarang telah dipersendjatai dengan pengertian^2 tentang soal^2 pokok Revolusi Indonesia, Rakjat sekarang sudah bisa mengetahui dengan djelas dasar^2 tudjuan dan kewadjiban Revolusi Indonesia, tentang kekuatan^2 sosial Revolusi Indonesia, tentang sifat Revolusi Indonesia, tentang haridepan Revolusi Indonesia, tentang musuh^2 Revolusi Indonesia. Djuga tentang program pembangunan, Rakjat akan mengetahui tentang tugasnja untuk menjelenggarakan pembangunan jang berwatak anti-imperialisme dan anti-feodalisme, membangun ekonomi nasional melikwidasi ekonomi kolonial jang mendjadi sumber pokok daripada kekatjauan dan segala penderitaan Rakjat. Beberapa projek pembangunan untuk Sulawesi jang termuat dalam pola pembangunan seperti dibidang produksi dan distribusi mengenai penambahan produksi beras dan kopra, bersama dengan pembangunan pabrik^2 untuk mengolah bahan^2 hasil kelapa, pembangunan perhubungan laut dan pelajaran serta dibidang pemerintahan dengan pembentukan empat provinsi di Daerah Sulawesi, dapat membuka kemungkinan^2 jang luas untuk memperbaiki tingkathidup Rakjat di Sulawesi. Itulah sebabnja Sdr. Ketua, saja jakin bahwa Rakjat di Sulawesi akan menjambut dengan gembira keputusan^2 MPRS dan bertekad pula untuk melaksanakannja, karena ja jakin bahwa perdjuangannja pasti akan berhasil dan segala pengorbanannja tidaklah sia^2.

Lebih besar lagi harapan Rakjat terhadap Ketetapan^2 MPRS, karena Ketetapan^2 itu adalah hasil daripada semangat persatuan dan gotongrojong jang meliputi seluruh pekerdjaan MPRS. Ini membuktikan bahwa asal

sadja semangat ini dikembangkan setjara konsekwen sampai kepada pelaksanaan keputusan² tersebut disegala bidang, tidak ada satu pekerdjaan bagaimana sulitpun jang tidak akan dapat diselesaikan sesuai dengan Manipol dan kepentingan Revolusi. Singkatnja agar supaja harapan Rakjat terhadap keputusan² MPRS ini dapat dipenuhi, hendaknjalah putusan² tersebut kita amalkan nanti sesuai dengan suasana jang ada dalam MPRS ini.

Menurut pendapat saja suasana jang mendjadi tjiri pokok dalam sidang MPRS jang mulia ini jalah suasana kerdjasama gotongrojong jang ber-inti persatuan NASAKOM, sedang metode kerdja jang pokok dari MPRS, jalah apa jang dikatakan oleh Kawan Aidit „guided democracy in action". Inilah jang telah memungkinkan MPRS menjelesaikan tugasnja dengan sukses jang gemilang. Banjak pembitjara dalam sidang ini telah menjerukan supaja suasana dan tjarakerdja jang telah kita alami dalam sidang MPRS ini dikembangkan terus sampai keluar gedung ini sampai kedaerah², ke-tengah² Rakjat. Djadi bisalah mendjadi kesimpulan kita jang penting, bahwa sjarat pokok untuk suksesnja pelaksanaan keputusan² MPRS jalah mentjiptakan iklim dan suasana persatuan NASAKOM, persatuan seluruh sukubangsa dan dipraktekkannja demokrasi terpimpin mulai dari pusat sampai kebawah.

Adalah tidak tepat pikiran sementara orang jang masih sadja mentjoba mentorpedir semangat dan prinsip kegotongrojongan, dengan Nasakom sebagai intinja bagi semua badan² dan alat² perlengkapan negara, termasuk badan² eksekutif dipusat maupun didaerah, dengan memberikan tafsiran setjara subjektif mengenai Manipol dan Pantjasila. Saja ingatkan sekali lagi utjapan Presiden Sukarno di Surabaja : „Kalau Pantjasila tulen harus setudju Nasakom".

Satu hal mengenai Sulawesi jang ingin saja singgung setjara chusus jalah masalah pemulihan keamanan. Bagi

tiap orang adalah terang bahwa pemulihan keamanan bukan sadja soal Rakjat di Sulawesi, melainkan adalah per-tama² soal Nasional. Oleh karena itu pemetjahan setjara pokok daripada keamanan di Sulawesi adalah djuga dengan tjara konsekwen melaksanakan prinsip² Manipol dan Djarek terutama prinsip Nasakom dan persatuan seluruh sukubangsa jang ditudjukan terhadap musuh pokok Rakjat dan Revolusi Indonesia jalah imperialisme dan kaum pemberontak kontra-revolusioner. Ini adalah perwudjudan dari prinsip mengikutsertakan Rakjat. Tetapi untuk mengikutsertakan Rakjat setjara maksimal sjarat pokoknja jalah mendjamin hak-hak demokrasi bagi Rakjat. Pengingkaran terhadap prinsip-prinsip tersebut adalah sengadja atau tidak sengadja penghambatan terhadap usaha pemulihan keamanan jang sungguh². Kenjataan menundjukkan bahwa dengan demikian, daja kekuatan dari Rakjat dan dari front anti-pemberontak diperlemah dengan akibat pemulihan keamanan bisa mendjadi ber-larut². Sedang pengalaman membuktikan bahwa dimana semua kekuatan revolusioner digunakan setjara maksimal terhadap kekuatan pemberontak, disitulah pemulihan keamanan dapat berdjalan dengan lantjar dan tertjipta sjarat untuk menghabiskan samasekali kekuatan pemberontakan baik kekuatan militernja maupun pengaruh politiknja. Saja jakin sepenuhnja bahwa djika prinsip² pemulihan keamanan didjalankan konsekwen menurut prinsip² diatas, keamanan di Sulawesi dan diseluruh Indonesia akan dapat dipulihkan dalam waktu jang ditentukan dalam Djarek, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1962 Rakjat dan Republik Indonesia akan merajakan Hari Proklamasi Kemerdekaannja dalam keadaan aman dan damai, bersih dari segala gerombolan pemberontak, dan pengatjau kontra-revolusioner.

Sdr. Ketua dan Madjelis jang mulia, marilah kita kembali ketempat dan daerah² kita masing², dengan semangat MPRS jang djaja jakni semangat gotongrojong,

demi untuk mensukseskan pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan I.

Hidup persatuan antara semua sukubangsa!
Hidup persatuan N a s a k o m!
Hidup semangat Gotongrojong!
Hidup Republik Indonesia!

J.P. Rissi

Hapuskan sisa² kekuasaan swapradja dan alat² negara jang anti-Rakjat

Saudara Ketua, Madjelis jang mulia,

Dentuman palugodam Pd. Ketua jang mulia pada hari Sabtu jang lalu, diriuhkan dalam nada persetudjuan dengan aklamasi atas Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana ini, laksana guntur dilangit, menandakan hari akan hudjan dan memberikan harapan kepada Rakjat jang sampai sekarang masih kekeringan dan kehausan sambil memberikan harapan kepada kaum tani, jang selama ini mengalami, segala tanam-tumbuhnja terantjam mati.

Memang Sdr. Ketua, sesuai dengan amanat PJM Presiden, MPRS dengan ditetapkan Garis² Besar Pola Pembangunan ini telah memberikan djawaban atas Amanat Penderitaan Rakjat itu, jang djuga bersifat Nasional, bersifat Semesta, malah djuga bersifat Berentjana, jaitu direntjanakan oleh kaum kolonialis dan kaum feodalis. Kata orang, se-berat² mata memandang, lebih beratlah bahu jang memikul. Dan kami, bersama saja adalah djuga sebagian dari Rakjat Indonesia jang berdiam didaerah kami, jaitu Sumba, Timor dan Flores jang saja wakili, adalah termasuk golongan Rakjat jang setjara langsung memikul dan merasakan apa jang dinamakan penderitaan Rakjat itu, penderitaan Rakjat jang berasal dan bersumber dari sisa² kolonialisme dan feodalisme karena memang daerah kami adalah daerah

jang masih hidup dalam alam jang penuh derita ini, atau lebih baik saja katakan, masih setengah mati dalam alam penderitaan itu.

Alangkah terharunja saja, tatkala didalam ketetapan MPRS No. II ini tertjantum pokok^2 pikiran, bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, akan membebaskan Rakjat dari penindasan dan penghisapan manusia atas manusia, akan menegakkan kembali kepribadian dan kebudajaan Indonesia, berdasarkan Demokrasi Terpimpin dan Gotongrojong, dan akan membebaskan ber-djuta^2 kaum tani dari segala pengaruh buruk kolonialisme-feodalisme dan segala matjam penindasan^2 lainnja. Konsekwensi dari pokok^2 pikiran itu antara lain adalah harus adanja Landreform jang mendjaminkan tanah kepada kaum tani penggarap, jang mendjamin bahwa tanah sebagai alat produksi tidak akan didjadikan alat penghisap dan pemerasan kaum tuantanah dan kaum feodal pemilik tanah dan jang mengangkat dirinja mendjadi jang dipertuan dari kaum tani jang mereka perhambakan dan hanja hidup untuk perbudakan dan karenanja itu, Swapradja^2 jang masih bersisa didaerah kami ini seharusnja akan dihapuskan, dihapuskan atas segala matjam dan segala bentuk kekuasaannja jang hidup hanja memeras dan menindas Rakjat, memeras dan menindas kaum tani pada chususnja jang djuga didalam MPRS ini saja turut mewakilinja.

Sdr. Ketua jang mulia. Kenapa saja amat terharu akan pokok^2 pikiran dan rentjana usaha jang saja kemukakan diatas? Telah saja katakan, bahwa Rakjat didaerah kami, termasuk djuga saja sendiri adalah orang^2 jang langsung merasakan dan memikul segala bentuk kedjahatan penindasan dari sisa^2 kekuasaan feodalisme jang dulunja mendjadi alat dan kuda beban imperialisme-kolonialisme itu.

Izinkanlah Sdr. Ketua jang mulia saja sekedar memberikan sedikit fakta^2 sebagai bukti, betapa ganasnja penindasan feodalisme jang masih diderita oleh Rakjat

didaerah saja. Fakta^2 itu akan berbitjara sendiri kepada Madjelis jang mulia, dan fakta^2 ini akan mejakinkan kepada Madjelis jang mulia betapa tepatnja Ketetapan MPRS hari Sabtu jang lalu dan bersama dengan itu akan mejakinkan pula kepada Madjelis Jang Mulia, kenapa saja mendjadi terharu tatkala mendengar palugodam ketua, jang sebagai Guntur Kebebasan memetjah penindasan.

Bukanlah kenjataan^2 dan praktek biadab jang masih sadja dilakukan dibeberapa Swapradja Nusatenggara terutama dibagian Timur. Berbitjara tentang „apa jang dinamakan Pengerahan Tenaga Rakjat atau Gotongrojong" a la Swapradja, terkenanglah saja akan pengalaman pahit a la Daendels jang baru^2 ini dilakukan didaerah Swapradja Amarasi. Kaum tani dikerahkan untuk membangun dan memperbaiki djalan^2 raja jang ber-puluh^2 kilometer djauhnja dari tempat kediaman mereka, tanpa memperhitungkan waktu jang diperlukan oleh kaum tani untuk mengerdjakan kebun^{2}nja. Mereka diharuskan membawa dan memikul bahan^2 makanan mereka sendiri dan ber-bulan^2 tidur di-pinggir^2 djalan dibawah kolong langit terbuka dengan berbantalkan batu dan berselimutkan pukulan dan hinaan. Bagaikan hewan^2 dipadang rumput.

Kaum tani jang belum berhasil mentjari bekal untuk mendjalankan tugas rodi Swapradja itu dan karenanja belum dapat mendjalankan tugas jang dinamakan „Gotong-Rojong" oleh tuan^2 feodal jang dibantu oleh opas^2 Radja dan mandor^2 Radja, kaum tani diikat pada batang lehernja dan ditarik dengan kuda kekantor Swapradja, sehingga ada diantaranja jang perlu digotong kerumah sakit. Perampas kebun^2 kaum tani jang sudah digarap untuk ditanam dalam musim hudjan, adalah praktek jang sudah dianggap wadjar oleh tuan feodal di Timor. Tidak hanja itu, seorang pendeta jang mentjoba membela kepentingan kaum tani, disiksa dan dianiaja setjara se-wenang^2 dan perlu dibawa kerumah

sakit hanja atas tuduhan jang di-buat² bahwa pendeta itu menghasut kaum tani untuk melutjuti sendjata polisi di Fatuleu.

Saja kira para anggota MPRS jang mulia telah mengetahui peristiwa Delha dipulau Roti, dimana rumah² kaum tani miskin jang tidak berdaja dibakar dibumihanguskan, sedangkan mereka sendiri dianiaja, disiksa, ditangkap dan dimasukkan dalam cel, dan diantaranja ada jang langsung ditembak oleh polisi. Mereka dituduh tidak mau membajar padjak. Keadaan jang sebenarnja jalah kaum tani itu tidak mampu membajar sekaligus 10 tahun tunggakan padjaknja. Kambing, babi dan barang² lain sudah dibeslah dan dilelang dengan harga jang ditentukan oleh Swapradja. Sekalipun demikian, perampasan itu belum djuga berhasil menghapuskan tunggakan padjak. Karena itu, tuan feodal ini menuntut agar bahan makanan kaum tani miskin jang didapatnja dengan penuh derita, djuga dirampas.

Begitulah Sdr. Ketua, keadaan kaum tani jang masih hidup dalam belenggu dan tjengkeraman feodalisme klas berat dan begitulah nasib kaum tani kita jang merupakan salahsatu kekuatan pokok dalam mentjiptakan kekajaan materiil bagi masjarakat Indonesia di Timor dan djuga merupakan salahsatu kekuatan pokok untuk menjelesaikan tugas revolusi Agustus 1945.

Penghapusan kekuasaan Swapradja seharusnja djuga berarti mengachiri kekuasaan bangsawan tuanbudak jang masih meradjalela dimasjarakat Sumba. Untuk mendjelaskan apa artinja kekuasaan tuanbudak bagi Sidang Jang Mulia ini Sdr. Ketua Jth., perkenankanlah saja memberikan sekedar fakta tentang satu peristiwa jang baru terdjadi dalam pertengahan tahun 1960.

Pada peristiwa penguburan seorang kepala daerah Swapradja Kanatang di Sumba, telah diperintahkan oleh keluarga bangsawan tuanbudak itu untuk membunuh seorang budak wanita ketjintaan almarhum bangsawan sebagai korban-manusia pada upatjara penguburan ter-

sebut. Faham dan adat jang kolot ini menghendaki pengurbanan demikian itu, karena kepentingan seorang tuanbudak didunia achiratpun perlu mendapatkan pelajanan.

Pembunuhan itu dilakukan dalam keadaan se-olah² budak wanita itu „terbunuh dalam keadaan mimpi berkelahi", dengan perhitungan sedapat mungkin luput dari tuntutan hukum pidana. Hal jang demikian ini dianggap biasa oleh keluarga bangsawan tuanbudak terhadap manusia machluk mulia wanita tani miskin jang sudah mati dengan tidak dikehendaki, apalagi perampas gadis dibawah umur dari keluarga tani untuk didjadikan budak oleh kaum bangsawan jang berkuasa. Kekedjaman² jang itu perlu segera diachiri.

Karena itu, Sdr. Ketua, saja selaku putra daerah dari Nusatenggara Timur menjambut baik keputusan penting dan jang bersedjarah ini sambil mendorong selekas mungkin dilaksanakan putusan² penghapusan kekuasaan Swapradja dan diadakannja retuling pada badan² dan alat kelengkapan Negara di-bidang² legislatif, eksekutif, dan judikatif didaerah kami sesuai dengan djiwa dan semangat Amanat Presiden Sukarno „Djalannja Revolusi Kita", dimana diikutsertakannja Rakjat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mendjamin hak² serta kebebasan² demokratis. Demikianlah supaja Rakjat di Nusatenggara Timur dapat pula merasakan kemanfaatan daripada kemerdekaan jang telah diperdjuangkannja itu dalam melawan kekuasaan dan keganasan feodalisme.

Dalam hubungan ini, saja serukan dihadapan Sidang Jang Mulia untuk menuntut pada golongan jang berkuasa di Nusatenggara Timur membebaskan kaum tani jang tidak bersalah, telah meringkuk dalam tahanan cel selama lebih dari 6 bulan, hanja karena mereka telah berdjuang melepaskan diri mereka dari belenggu feodalisme seperti apa jang telah mendjadi keputusan bulat dari MPRS ini.

Mereka meringkuk bukan mentjuri, bukan karena korupsi dan djuga bukan karena sesuatu kedjahatan.

Berbitjara tentang pelaksanaan landreform seharusnja didjalankan setjara konsekwen di Nusatenggara Timur maka kaum tani akan bisa terlepas dari penghisapan feodal dan gadis^2 tani akan menari serta memainkan sesandonja dengan meraju lagu merdu, karena tjukup sudah derita dialami dan mimpi akan membangun hari depan jang bahagia sudah menunggu dalam kenjataan.

Mari kita likwidasi segala keterbelakangan feodal.

Hidup Rakjat Indonesia .... jang tidak mesti kerdja paksa, disiksa dan ditembak mati.

Hidup Nasionalis, Agama dan Komunis.

Hidup N a s a k o m.

Umar Lesteluhu

Bebaskan Irian Barat & lenjapkan sisa-sisa feodalisme

Saudara Pimpinan jang terhormat dan Sidang Madjelis jang mulia.

Saja berbitjara ini adalah sebagai seorang anggota MPRS dari golongan karja tani dan sebagai seorang putera Indonesia jang berasal dari daerah Maluku, jang ingin menjampaikan sebuah sambutan singkat terhadap Pola Pembangunan Semesta Nasional Berentjana ini.

Saja sangat bergembira, sebab dengan disahkannja Pola ini, mendjadi suatu pegangan untuk dilaksanakan sebagai langkah pertama untuk menghabisi samasekali imperialisme dan feodalisme, kearah tertjapainja masjarakat jang adil dan makmur.

Sebagaimana daerah^2 lainnja di Indonesia, Maluku adalah suatu daerah jang kaja dengan rempah^2, tanahnja subur, teristimewa kaja kopra, kaja ikan dan mutiara, dan lain^2 hasil tanah dan lautan jang tersedia untuk diolah. Selain daripada itu Rakjatnjapun memiliki tradisi revolusioner dan ingin madju dalam soal^2 material dan mental, rohaniah maupun djasmaniah.

Daerah Maluku terdiri dari banjak pulau^2 tempat lalulintas kapal^2 besar dan ketjil. Selain itu djangan dilupakan bahwa Maluku adalah daerah perbatasan dengan Irian Barat jang kini masih didjadjah oleh kolonialisme Belanda. Djustru karena itu mempertinggi taraf hidup Rakjat didaerah Maluku itu serta mema-

djukan pendidikan disana, singkatnja melaksanakan pembangunan didaerah Maluku bukan sadja mempunjai arti meningkatkan kemakmuran Rakjat sadja, tetapi djuga erat sekali hubungannja dengan memperkokoh semangat perdjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari belenggu kolonialisme Belanda, tambah mejakinkan Rakjat di Irian Barat akan kebaikan Republik, serta mempertinggi prestise negara dalam bidang politik internasional.

Benar sekali jang dikatakan oleh PJM Presiden dalam amanat Pembangunannja pada tanggal 28 Agustus 1960 kepada Depernas al. sebagai berikut (APP hal. 81) :

„Didalam persoalan ini, baik irigasi, maupun intensifikasi, maupun industrialisasi kita tak boleh lepas dari persoalan nation-building. Kita tidak boleh lepas dari persoalan politik. Djangan lupa segala hal ini ada hubungannja dengan persoalan politik pula, misalnja politik perdjuangan untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik. Sehingga Sdr.^{2} harus misalnja memikirkan hal irigasi, bukan sadja untuk memberi misalnja imigrasi kepada satu daerah jang memang tanahnja subur, airnja ada, tetapi djuga Sdr. pikirkan daerah jang berdekatan dengan Irian Barat kita beri irigasi agar supaja Rakjat disana benar^2 mendjadi makmur, agar supaja Rakjat disana benar^2 mendjadi tjontoh bagi seluruh dunia, bahwa didaerah Republik dekat Irian Barat ada pembangunan jang lebih besar dan lebih hebat daripada di Irian Barat sendiri. Kita perbesar potensi daripada Rakjat, terutama sekali Rakjat diperbatasan dekat Irian Barat itu, kita pertinggikan ia punja potensi, agar supaja perdjuangan kita seluruhnja untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik mendjadi kuat".

Amanat PJM Presiden itu tjukup djelas dan tegas.

Tidak berbeda dengan daerah lainnja, Rakjat Maluku jang sebagian besar terdiri dari kaum tani dan

kaum nelajan jang radjin bekerdja, tjinta merdeka, tjinta demokrasi dan mempunjai hasrat untuk membangun. Untuk menimbulkan antusiasme mereka, untuk memobilisasi Rakjat didaerah Maluku dalam pembangunan, berikanlah kepada mereka lebih banjak demokrasi.

Selain itu, perhubungan laut sangat dibutuhkan, sebab masalah perhubungan laut (perhubungan antar pulau) sangat memegang peranan jang mempengaruhi masalah ekonomi pada umumnja, masalah produksi dan distribusi pada chususnja.

Para nelajan supaja diperlengkapi dengan alat^2 penangkapan ikan, antara lain dengan adanja armada^2 nelajan, dengan tjukup perahu^2 besar seperti motor^2 nelajan dll. sebab dengan demikian mereka bisa dapat memperbanjak hasil produksi ikan dan hasil^2 laut lainnja seperti kerang, mutiara, tripang dll., dilain pihak turut membantu melantjarkan pengangkutan antar pulau, serta turut membantu keamanan dilaut dari gerakan subversif asing.

Satu hal lagi jang perlu saja kemukakan bahwa pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, hasil mutiara di Maluku (Dobo) digadaikan kepada Australia, jang perusahaannja ketika itu bernama C.T.C. (Celebes Trad. Coy).

Tindakan ini memang sesuai dengan watak pendjadjahannja pada waktu itu. Sekarang kita telah merdeka, supaja kita tudjukan perhatian untuk menggali hasil mutiara ini dengan sungguh^2 sebab hasil tersebut dapat pula menambah devisen negara.

Dalam pada itu, menurut pengalaman setiap rentjana jang baik bisa mendjadi matjet kalau tenaga pelaksanaannja tidak sungguh^2. Dalam melaksanakan Pola Pembangunan Semesta Berentjana ini dari pusat sampai di-daerah^2, supaja tenaga^2 pelaksana benar^2 berdjiwa Manipol dalam kata^2 dan perbuatan.

Saja jakin dan pertjaja, bila Pola Pembangunan Semesta Nasional Berentjana ini dilaksanakan dengan sungguh² dengan berpedoman kepada Amanat Penderitaan Rakjat dan Manipol, dia akan membikin Rakjat lebih gairah dan akan tergembleng semangat Rakjat anti-imperialisme dan kolonialisme untuk membebaskan Irian Barat dan melenjapkan sisa² feodalisme.

Messer Tanggap Peleng

Melaksanakan Demokrasi Terpimpin atas dasar Musjawarah

DENGAN NASAKOM SEBAGAI KEKUATAN POKOK

Sdr. Ketua, Pimpinan Sidang dan Sidang Madjelis jang mulia.

Pada tanggal 19 bulan jang lalu MPRS telah mengambil langkah besar dan penting dalam sedjarah, jaitu mengambil satu keputusan jang gemilang, menetapkan dan memperkuat Manipol dan perintjiannja jang sudah kuat, karena sudah diterima oleh Rakjat diseluruh Nusantara sebagai Garis² Besar Haluan Negara. Saja katakan ia adalah keputusan jang gemilang, karena Manipol dengan djelas merumuskan dan mendjawab banjak persoalan² pokok Revolusi Agustus 1945 jang anti-imperialisme dan feodalisme.

Kitapun bangga atas lantjarnja permusjawaratan dalam MPRS ini, dalam mengolah Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana hasil karya Depernas, jang achirnja setelah beberapa hari Komisi² bekerdja dengan tidak mengenal lelah, berhasil menetapkan Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana mendjadi satu keputusan dengan suara *bulat*. Dengan demikian saja tidak ragu² mengatakan bahwa kebanggaan ini adalah kebanggaan nasional, karena ia seperti jang diutjapkan oleh Sdr.

Njoto dalam pidatonja tanggal 19 November jang baru lalu : „kita terima dengan suara bulat, hati bulat, jang berarti, terbitnja tjahaja jang hebat, tjahaja persatuan segenap kekuatan nasional dengan Nasakom sebagai porosnja dan Manipol sebagai landasannja". Kenjataan ini sudah sewadjarnja mendjiwai seluruh kehidupan masjarakat Indonesia pada umumnja dan daerah Kalimantan pada chususnja.

Selama sidang MPRS ini selandjutnja kita menjaksikan demokrasi terpimpin itu dalam aksi, bukan dalam kata², sehingga berhasil dalam waktu singkat dan dengan suara bulat, mufakat menetapkan Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana atas karya Depernas disegala bidang pembangunan, seperti dibidang Mental/Agama/Kerochanian/Penelitian, bidang Kesedjahteraan, bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan, bidang Produksi, bidang Distribusi dan Perhubungan, bidang Keuangan dan Pembiajaan. Ini adalah hasil MPRS jang menggembirakan dan bukan sadja dalam sidang Madjelis ini ; tentu hasil ini disambut dengan hangat dan kegembiraan oleh Rakjat Indonesia diseluruh pendjuru tanahair.

Saja selaku putera Indonesia jang berasal dari Kalimantan Tengah, dimana penduduknja terdiri lebih dari 20 anak sukubangsa Daya, menjatakan sambutan jang hangat, dengan rasa gembira atas ketetapan MPRS mengenai Manipol dan Ketetapan no. II MPRS mengenai Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, sebagai hasil masa sidang MPRS jang pertama jang penting dan bersedjarah ini. Ia adalah satu usaha untuk memenuhi apa jang selalu di-sebut² oleh PJM Presiden Amanat Penderitaan Rakjat. Ketetapan jang telah kita mufakati bersama itu memberi harapan² bagi Rakjat kita.

Misalnja, dibidang produksi sandang, betapa pahitnja kenjataan sekarang, bahwa sebagian besar Rakjat Indonesia terutama kaum tani di Kalimantan Tengah, rata² hanja mempunjai pakaian sepasang setiap orang;

betapa gembiranja kaum tani kalau dalam 2 á 3 tahun mereka akan memiliki pakaian 2 á 3 pasang pula jang pantas. Bahan untuk memenuhi harapan sederhana ini memang banjak, di-hutan² Kalimantan Selatan dan Tengah, selain terdapat pohon² kaju bahan rayon, djuga banjak terdapat pohon karet jang dapat didjadikan sasaran bagi produksi rayon. Dalam peremadjaan pohon karet Rakjat sekarang ini, ratusan ribu M^3 pohon² karet jang terbuang pertjuma; sedangkan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta, bahan rayon diperlukan sampai 49% dari djumlah bahan sandang.

Dibidang produksi pangan adalah satu kenjataan pula, bahwa kaum tani jang semestinja menghasilkan bahan makanan, djustru malah masih me-nunggu² pangan seperti beras jang diimpor dari luarnegeri. Maka dalam hal ini dapat kita bajangkan betapa gembiranja kaum tani di Kalimantan mendapat tanah garapan dengan irigasinja jang mendjamin meningkatnja hasil produksi pangan.

Kita harus menginsjafi pentingnja transmigrasi dari tempat jang penduduknja padat ketempat penduduknja jang sangat kurang dalam rangka memperbanjak hasil produksi pangan ini. Rakjat Kalimantan Tengah setjara luas bersedia menerima para transmigran dengan hati jang terbuka pula. Hanja sadja kami harap perhatian dalam melaksanakan transmigrasi supaja menarik pengalaman² jang sudah lalu, agar tidak menemui kegagalan jang keempat kalinja, karena kurang sekali persiapan seperti perumahan tidak ada, djaminan hidup jang tidak memenuhi kebutuhan dan perdjandjian, alat kerdja tidak ada, kesehatan tidak terdjamin dsb. Para transmigran jang dimaksudkan itu hampir $^2/_3$-nja dididik menggunakan alat pertanian modern (traktor), sedangkan di Kalimantan Tengah hanja diberi satu parang dan satu patjul dan tidak disediakan traktor²nja.

Satu hal jang agak aneh, apabila kaum tani dan Rakjat pekerdja lainnja di Kalimantan Timur dan Tengah setiap tahun diwadjibkan membajar padjak djalan

sedangkan daerah itu boleh dikatakan hampir tidak mempunjai djalan raja samasekali. Kalimantan Timur dan Tengah jang luasnja lk. 2½ kali pulau Djawa hanja mempunjai djalan raja sepandjang 119 Km, itupun tidak terpelihara. Soal² perhubungan daerah ini, adalah soal jang urgen dan mendesak; maka sebelumnja djalan² raja menurut projek Pola Pembangunan Semesta dapat diselesaikan, sebaiknja Pemerintah mengusahakan pengangkutan² sungai, seperti sungai² Barito, Kapuas, Kahajan, Katingan dan Mahakam hingga mendjamin hubungan lalulintas dan kelantjaran² ekonomi daerah itu. Kurangnja pengangkutan sungai bukan sadja mengganggu ekonomi Rakjat, menghalangi kelantjaran distribusi, terhambatnja perdjalanan dinas pegawai negeri, tetapi djuga langsung menimbulkan kerugian bagi perusahaan Negara, tambang batubara Muara Bakah (di Barito) karena hasilnja lk. 1/3 sadja jang bisa diangkut saban bulan, sehingga Negara tidak memperoleh keuntungan maximum dari perusahaan Negara ini karena kesulitan perhubungan; selain itu untuk menghubungi daerah² jang terpentjil djuga penting perluasan perhubungan udara.

Sidang madjelis jang mulia.

Demikianlah beberapa fakta kehidupan dari daerah Kalimatan jang menggambarkan disatu pihak potensi jang besar daerah ini bagi pelaksanaan Pembangunan Semesta Ketetapan no. II MPRS, tetapi dipihak lain masih dikekang oleh sisa² imbangan kerdja imperialis, seperti al. di Kalimantan Timur dan oleh keterbelakangan feodal, merupakan langkah penting menudju terbukanja potensi tersebut untuk mentjapai tjita² kita bersama, masjarakat jang merdeka penuh dan demokratis, menudju masjarakat adil dan makmur.

Nj. Suharti Suwarto

Pola Pembangunan & kaum Wanita

Sdr. Ketua dan sidang MPRS jang terhormat,

Pola Pembangunan Semesta jang direntjanakan oleh Depernas telah dibahas bersama dalam MPRS dan telah ditetapkan mendjadi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama 1961-1969 dengan Ketetapan No. II/MPRS/1960. Saat ini adalah saat jang bersedjarah bagi Rakjat Indonesia, terutama bagi anggota MPRS jang langsung memberikan andilnja, dimana ikutserta 40 orang anggota wanita. Setelah Pola Pembangunan Semesta itu mendjadi milik kita sekalian, maka kini tergantung pada pelaksanaannja, agar pola itu mendjadi satu realitet.

Diantara para pelaksana pola tidaklah pula dapat dikesampingkan adanja kenjataan, bahwa kaum wanita perlu diikutsertakan dan mendapat manfaat dari pelaksanaan pola tersebut. Kenjataan itu dapat dilihat dari banjaknja kaum wanita jang mengambil bagian langsung dalam proses produksi. Ditanahair kita terdapat ± 2 djuta buruh wanita, jaitu 30% dari seluruh kaum buruh. Mereka itu jang banjak bekerdja di-perusahaan² perkebunan (rata² 45%, bahkan diperkebunan teh dan kopi sampai 70%), di-perusahaan² industri ringan rata² 30%, diindustri tekstil dan rokok rata² 60%. Selain

daripada itu lebih dari 50% kaum tani adalah wanita tani, jang radjin bekerdja dilapangan pertanian. Banjak kaum wanita terpeladjar pula jang bekerdja sebagai dokter, hakim, djaksa, bidan, djururawat, guru, insinjur, dan sebagai pedjabat² pemerintah lainnja jang tidak kurang pentingnja.

Djika pola ini dilaksanakan setjara konsekwen dan sungguh², berdasarkan djiwa dan semangat dari Manifesto Politik dan Amanat Pembangunan Presiden, maka setjara tingkat demi setingkat kita pasti akan menudju kemasjarakat adil dan makmur, masjarakat sosialis Indonesia, sesudah dihapuskan sisa² feodalisme dan kolonialisme, jang sudah barang tentu akan membebaskan kaum wanita dari beban berbagai matjam distribusi dan keterbelakangan feodal.

Untuk konsekwen melaksanakan pola ini, maka sjarat jang saja anggap penting jalah perlunja dipegang teguh apa jang dinjatakan dalam Amanat Pembangunan Presiden halaman 27 buku ke-I djilid I, tentang „Menghidupkan potensi Rakjat". Usaha mengikutsertakan Rakjat tersebut hendaknja senantiasa didasarkan atas bunji UUD 45 fasal 28 jang mendjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan fasal 27, jang mendjamin persamaan hak antara laki² dan wanita, artinja pelaksanaan pola tersebut hendaknja didjalankan tanpa diskriminasi.

Sebagai satu misal perlu saja kemukakan disini, bahwa untuk suksesnja pelaksanaan landreform jang harus disertai dengan demokratisering desa dan industrialisasi, maka perlu didjamin hak² wanita untuk ikutserta dalam rapat² desa, untuk dipilih sebagai kepala desa, untuk mengadjukan pendapat²nja bagi pembangunan desa dan mempersoalkan perbaikan djaminan sosial mereka dsb. Oleh karena itu saja menjambut keputusan Komisi C jang telah dilampirkan dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 tersebut jang mengharuskan dihapuskannja per-

aturan² seperti IGO, jang melarang wanita mendjabat kepala desa, karena peraturan ini adalah warisan kolonial jang kolot dan tidak sesuai lagi dengan UUD 45 dan Konvensi Hak² Politik Wanita.

Selandjutnja bagi wanita pekerdja, maka ketjuali hak² mereka jang tertjantum dalam UU Kerdja No. 1/51 dilaksanakan, djuga pelaksanaan konvensi no. 100 ILO tentang upah sama untuk pekerdjaan jang sama nilainja, perlu didjalankan baik diperusahaan/djawatan pemerintah maupun diperusahaan swasta. Hendaknja ditjegah adanja massa onslag bagi buruh/pegawai wanita jang sudah kawin, dan sebaliknja hendaknja kepentingan mereka itu dipetjahkan dengan antara lain perlunja mempertimbangkan untuk meratifikasi konvensi² ILO lainnja jang melindungi kaum wanita jang bekerdja seperti Konvensi No. 103 tentang perlindungan keibuan (Protection of motherhood).

Untuk terdjaminnja kesedjahteraan keluarga sebaiknja dipertimbangkan pula untuk segera dikeluarkannja UU Perkawinan jang demokratis jang telah lama mendjadi tuntutan perdjuangan kaum wanita.

Demikianlah antara lain sambutan dan harapan saja tentang perlunja pola tersebut dilaksanakan tanpa diskriminasi, dan perlunja segera diretul sikap, pandangan maupun peraturan/per-undang²an jang tidak sesuai dengan alam Manifesto Politik dari amanat Pembangunan Presiden.

Chususnja dibidang pendidikan, maka saja menjambut ketetapan MPRS jang termaktub dalam lampiran A, hasil komisi A, jang menegaskan garis pendidikan nasional kita, jaitu „Politik dan sistim pendidikan nasional kita baik jang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak swasta dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaja melahirkan warganegara Indonesia jang berdjiwa Pantjasila dan berdjiwa patriot komplit, supaja melahirkan tenaga² kedjuruan jang ahli dan berdjiwa Revolusi Agustus 45,

suatu politik dan sistim pendidikan jang menitikberatkan pendidikan kedjuruan".

Mengingat sangat pentingnja peranan pendidikan ini bagi terlaksananja pembangunan haridepan tanahair kita, maka sudah sewadjarnja bilamana setiap orangtua murid dan organisasi² massa lainnja termasuk organisasi² wanita mengambil peranan untuk mendorong putra-putri kita menempuh pendidikan jang menghasilkan ahli² jang praktis dan segera dibutuhkan oleh masjarakat, serta mentjegah diratjuninja anak² kita dari kebudajaan asing jang merusak.

Selain daripada itu patut pula disambut keputusan MPRS untuk menetapkan pendidikan Taman Kanak² mendjadi pola projek, mengingat hal ini sudah merupakan kebutuhan kaum ibu jang mendesak. Dalam hal penjatu-ragakan pendidikan dirumah dan pendidikan disekolah, maka kaum ibu seharusnja mengambil peranan jang penting dalam organisasi² POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) untuk membantu supaja anak² kita mendjadi pandai dan patriotik.

Demikianlah menurut pendapat saja pada umumnja pola itu djika dilaksanakan dengan sungguh² dan konsekwen, maka dia akan merupakan tahapan pertama menudju masjarakat baru jang memberi manfaat bagi kesedjahteraan keluarga dan kebahagiaan anak².

Marilah kita mengedapkan apa jang dinjatakan oleh Ibu Kartini tentang djaman baru itu, jang terdapat didalam tulisannja dalam buku *Habis gelap terbitlah terang* sbb. :

„Daripada mati itu akan tumbuh kehidupan baru. Kehidupan baru itu tiada dapat di-tahan², dan meskipun sekarang dapat djuga di-tahan², besoknja akan tumbuh djuga dia, dan hidup makin lama makin kuat dan makin teguh"..... Berbahagialah kita hidup pada masa kini!

Masa perubahan dimana masa kuno beralih mendjadi masa baru !"

Sukatno

Harapan kita sekarang tertudju pada pelaksanaan jang konsekwen dari keputusan² MPRS

Saudara Pimpinan Jth.
Madjelis Jang Mulia,

Perkenankanlah saja menjatakan kegembiraan jang besar dalam menjambut hasil karja persatuan jang bersedjarah dari musjawarah² kita selama empat pekan ini. Kegembiraan saja ini adalah sebagian sadja dari kegembiraan ber-djuta² generasi muda Indonesia jang sedang bekerdja di-pabrik², kantor² dan disawah dan ladang, jang beladjar di-bangku² sekolah rendah sampai ke-universitas dan jang dengan penuh harapan menatapkan pandangannja kepada pekerdjaan kita.

Sungguhlah kelahiran jang tepat pada waktunja. Disahkannja garis² besar haluan negara dan haluan pembangunan serta pedoman² pelaksanaannja oleh MPRS, adalah sangat bertepatan dengan makin tingginja kesedaran politik pemuda² kita. Kesedaran politik jang meninggi ini dinjatakan dalam sikapnja jang makin kritis terhadap segala sesuatu, terhadap semua jang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan tanahair dan Rakjat kita di-bidang² politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan termasuk hasil² pekerdjaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan pelaksanaannja.

Tidaklah pula saja lebih²kan, apabila saja katakan bahwa harapan dari generasi jang paling berkepenting-

an bagi perkembangan dimasadepan dari tanahair dan Rakjat Indonesia itu telah mendapatkan djawaban jang membesarkan hati, dengan disempurnakan dan disahkannja Garis^2 Besar Pola Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama Delapan Tahun. Sinar jang per-tama^2 saja lihat dengan adanja Pola Pembangunan Semesta ini, adalah didalam pelaksanaannja bisa mendorong pemetjahan salahsatu problim nasional jang sangat vital dan jang sangat langsung menjangkut penghidupan pemuda, jaitu pembukaan lapangan^2 kerdja baru. Saja katakan sinar, oleh karena memang demikianlah keadaannja, bahwa tidak sedikit pengaruh daripada berlangsungnja krisis^2 ekonomi jang menimpa kehidupan tanahair dan Rakjat kita selama ini telah mentjiptakan kabut jang kian hari kian menebal dihadapan djalannja madju para remadja kita. Ditambah lagi dengan tak henti^{2}nja berketjamuk teror dan subversi dari kekuatan^2 kaum imperialis dan kontra-revolusioner disebagian besar wilajah dan desa^2 kita tertjinta, telah banjak merusak kehidupan djasmani dan rochani dari pemuda^2 Indonesia, terutama pemuda^2 tani dan pemuda^2 pekerdja lainnja.

Salahsatu sifat jang chas dari manusia muda, adalah mau madju dan didalam waktu jang singkat ingin merebut sesuatu jang gemerlapan djauh dihadapannja dengan semangat jang me-njala^2, tidak hanja untuk kepentingannja sendiri akan tetapi untuk seluruh masadepan tanahair dan bangsa. Tetapi alangkah banjaknja sudah pemuda^2 kita jang diketjewakan oleh tidak sesuainja realisasi tjita^2 dengan pahit-getirnja kenjataan se-hari^2. Semangat beladjar jang me-njala^2 didalam gedung^2 sekolah atau universitas, dipaksa oleh kenjataan harus membeku pada saat^2 hampir sampai pada taraf^2 terachir, karena tidak menentunja nasib jang menanti di-tengah^2 masjarakat. Ini bagi pemuda^2 jang sempat berbahagia menduduki bangku^2 sekolah. Bagi pemuda^2 jang dirampas hak^{2}nja untuk memiliki kesem-

patan itu oleh keadaan, dan ini merupakan bagian jang tidak ketjil dari pemuda^2 kita, terutama pemuda^2 tani, nasib jang dihadapi mendjadi lebih tidak menentu lagi. Demikian tadjamnja kontradiksi^2 jang ditjiptakan oleh wadjarnja tjita^2 dengan pahitnja kenjataan hidup kita se-hari^2.

Saudara Ketua, Gelombang daripada kontradiksi^2 itu tidak hanja menjebabkan satu dua pemuda jang kehilangan pegangan dan jang dihinggapi oleh gedjala^2 negatif seperti atjuh tak atjuh, spekulasi dan bahkan mistik, akan tetapi sebaliknja gelombang daripada paradox^2 itu malah melahirkan gerakan pemuda Indonesia jang berkesedaran politik jang tinggi. Inilah jang saja katakan, bahwa putusan^2 MPRS ini adalah kelahiran jang tepat pada waktunja, dimana bagian terbesar daripada Indonesia akan menjambutnja dengan sikap jang kritis, sikap jang tak terpisahkan dengan gerakan revolusioner Rakjat kita jang sedang berdjuang untuk menjelesaikan tuntutan^2 Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar^{2}nja.

Madjelis jang mulia kiranja sependapatlah dengan saja, bahwa pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta jang harus sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia dan Amanat Pembangunan Presiden, ketjuali memberikan sedikit sinar bagi terbukanja lapangan^2 kerdja baru (werkverschaffing), tenaga^2 pembangunan djuga harus dipersiapkan dengan baik dikalangan pemuda^2. Dan pelaksanaan daripada kepentingan ini haruslah sedjalan dengan pelaksanaan pembangunan chususnja dibidang pendidikan. Adalah tepat sekali djawaban jang telah diberikan oleh hasil^2 musjawarah Madjelis kita didalam hal ini, jaitu jang menekankan bahwa semangat pembangunan itu harus menguasai sistim pendidikan kita. Dan mengenai hal ini pelaksanaannja tidak hanja terbatas dengan mengubah imbangan memperbesar djumlah fakultas untuk pengetahuan exakta dibanding dengan pengetahuan sosial pada pen-

didikan tingkatan universitas, akan tetapi jang lebih penting adalah didalam bentuk memperbanjak sekolah² kedjuruan pada tingkatan menengah. Djuga pada tingkatan sekolah rendah, untuk menanamkan semangat pembangunan itu saja berpendapat tepatlah apabila pendidikan politeknik didjadikan salahsatu unsur peladjaran jang penting.

Dalam pada itu persoalan jang tak kalah pentingnja, adalah meluaskan pelaksanaan pendidikan aplikasi bagi para buruh dan pegawai² muda, untuk mempertinggi ketjakapannja. Dilaksanakannja pendidikan aplikasi ini dengan sungguh², pasti djuga akan mempertinggi dan memperbesar rasa tanggungdjawab mereka kepada tugas² pekerdjaan jang dipikulnja. Kepada pemuda² tani sebagai kekuatan produktif jang paling segar di-desa², harus pula diberikan perhatian jang sungguh², terutama didalam usaha mempertinggi tingkat kebudajaannja. Disamping usaha jang intensif dalam aktivitet pemberantasan butahuruf, hendaknja disedjalankan pembangunan balai² pemuda di-desa².

Semuanja ini saja kemukakan didalam semangat dengan sungguh² berusaha untuk menuangkan perasaan dan fikiran jang penuh tanggungdjawab daripada generasi muda kita menjambut sekilas sinar jang dipantjarkan oleh Pola Pembangunan Semesta Berentjana. Namun demikian saja mohon perhatian jang sungguh² dari Madjelis jang mulia, dari semua jang dengan sungguh² sedang mengarahkan pandangannja kepada kebesaran tanahair dan bangsa Indonesia dimasadepan, bahwa kesungguhan dan tanggungdjawab pemuda ini harus disambut dengan selajaknja pula. Dapatkah misalnja, orang mengandjurkan supaja pemuda² kita beladjar jang baik dan malahan dengan bendera „studi terpimpin" tetapi tanpa ada ke-sungguh²an untuk memenuhi kebutuhan beladjar dan diturunkannja harga buku² ilmu pengetahuan ? Dapatkah orang mengandjurkan supaja pemuda² kita bermoral jang baik, tetapi didalam praktek

lebih suka membiarkan beredarnja madjalah² atau batjaan a la Picolo dan „Varia" daripada memperkenankan diterbitkannja madjalah atau batjaan jang berguna bagi pendidikan pemuda ? Dapatkah orang mengandjurkan supaja pemuda² mentjintai kerdja dan pabrik² untuk mempertinggi produksi, akan tetapi didalam praktek lebih suka melihat modal asing meradjalela menguras keuntungan dan kekajaan tanahair kita daripada melihat Republik dan modal Indonesia menguasai sumber² kekajaan kita ? Dapatkah orang mengandjurkan pemuda² kita mentjintai desa dengan segala kesuburannja, akan tetapi didalam praktek lebih suka melihat tuan-tanah dan lintahdarat be-ramai² mentjintjang nasib tani-miskin dan buruh-tani daripada melihat kaum tani beramai² mengerdjakan tanah garapannja sendiri atau tanahnja orang lain dengan sewa jang murah ? Dapatkah orang mendidik patriotisme pemuda² kita dengan mengadjarkan bahwa wilajah Republik Indonesia jang sah adalah terbentang dari Sabang sampai Merauke, akan tetapi didalam praktek aksi² pemuda untuk pembebasan Irian Barat harus dipersulit ? Hanja dengan kekonsekwenan untuk melenjapkan kepintjangan² ini, maka kesungguhan dan rasa tanggungdjawab generasi muda kita didjawab dengan semestinja.

Kesedaran politik dan sikap kritis pemuda berdiri dengan tegas diatas landasan semangat persatuan jang makin kokoh dikalangan pemuda. Digedung kita jang bersedjarah ini, beberapa bulan jang lalu Manifesto Politik Republik Indonesia telah menggugah dan menjatukan semua kekuatan revolusioner dikalangan pemuda, jang diilhami oleh aliran² besar Rakjat kita, Nasionalis, Agama dan Komunis. Jaitu didalam Kongres Pemuda Seluruh Indonesia bulan Februari tahun 1960 ini. Sekarang lembaga kedaulatan Rakjat jang tertinggi, didjiwai oleh Undang² Dasar 45 telah meletakkan rel revolusi Manifesto Politik Republik Indonesia dan pedoman² pelaksanaannja. Persatuan revolusioner pemuda

Indonesia ber-sama2 dengan seluruh kekuatan revolusioner Rakjat Indonesia, akan mendjadi pelaksana2 jang militan. Dan bersamaan dengan itu, mendjadi pengawas-pengawas jang kritis terhadap kemampuan para petugas didalam mengikuti irama zaman, jaitu irama Manifesto Politik dan irama „Djalannja Revolusi kita".

Sedjarah perdjuangan Rakjat kita telah membuktikan, bahwa dengan tanpa mementingkan diri sendiri, pemuda selalu siap untuk ikut tampil dibarisan depan Rakjat kita, didalam perdjuangan mempertahankan dan membangun Republik, untuk melawan imperialisme dan melenjapkan sisa2 feodalisme. Malahan diminta, didalam membangun Pertahanan Rakjat Semesta sebagai salah-satu djaminan bagi pengamanan pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berentjana, dan untuk membersihkan sisa2 pengganggu keamanan dari kaum kontra-revolusioner dan subversi kaum imperialis, sudah dimulai pelaksanaan wadjib militer dan wadjib latih bagi Rakjat, chususnja bagi pemuda2 taraf demi taraf.

Ketetapan MPRS RI

No: I/MPRS/1960 tentang

MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS2 BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia.

Dalam Rapat Pleno ke-4 Sidang Pertama pada tanggal 19 November 1960 di Bandung.

Setelah membahas :

1. Amanat Negara jang diutjapkan oleh Presiden pada Pembukaan Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pada hari Pahlawan 10 November 1960 ;

2. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959, jang berdjudul „Penemuan kembali Revolusi kita" dan jang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia ;

3. Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang „Perintjian Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959" tertanggal 25 September 1959 No. 3/Kpts/Sd/II/59, jang telah disetudjui oleh Presiden dalam „Kata Pengantar" Manifesto Politik Republik Indonesia pada hari Pahlawan 10 November 1959 ;

4. Amanat Presiden pada Sidang Pleno pertama Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berentjana pada tanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan dan jang tertulis, jang mendjadi bagian daripada haluan Negara ;

5. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 jang terkenal dengan nama „Djalannja Revolusi Kita" jang

mendjadi pedoman pertama daripada pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia :

6. Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 jang diutjapkan dimuka Sidang Umum P.B.B. jang berdjudul "To build the world anew" (Membangun dunia kembali) ;

Menimbang : bahwa perlu segera ditetapkan garis² besar daripada haluan Negara dengan bagian²nja serta pedoman² pelaksanaannja ;

M e n g i n g a t :

1. Amanat Penderitaan Rakjat jang tergambar dalam Pembukaan Undang² Dasar 1945 ;

2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 5 Djuli 1959 ;

3. Undang² Dasar 1945.

a. Pasal 1 ajat 2 jang menentukan bahwa „Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat" ;

b. Pasal 3 jo pasal IV Aturan Peralihan ;

c. Pasal 2 ajat 3 ;

4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 ;

5. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 ;

6. Bahwa Rakjat Indonesia diseluruh kepulauan Nusantara Indonesia telah menerima dan mempertahankan Manifesto Politik Republik Indonesia serta perperintjiannja ;

M e n d e n g a r :

Permusjawaratan dalam rapat² MPRS pada tanggal 17 s/d 19 November 1960 :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Ketetapan tentang garis² besar daripada haluan Negara sebagai berikut :

P a s a l I.

Memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia serta perperintjiannja sebagai garis² besar daripada haluan Negara.

P a s a l II.

Amanat Presiden pada Sidang Pleno Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berentjana pada tanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan dan jang tertulis adalah garis² besar daripada haluan pembangunan.

P a s a l III.

Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 jang terkenal dengan nama „Djalannja Revolusi Kita" dan pidato Presiden tanggal 30 September 1960 dimuka Sidang Umum PBB jang berdjudul "To build the world anew" (Membangun dunia kembali) adalah pedoman² pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

P a s a l IV.

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan² ini.

Ditetapkan dikota Bandung pada tanggal 19 November 1960

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA

Chaerul Saleh
Mr. Ali Sastroamidjojo
K.H. Idham Chalid
D.N. A i d i t
Kol. Wilujo Puspojudo

Ketetapan MPRS RI

No : II/MPRS/1960, tentang

GARIS² BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENTJANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia.

Dalam Rapat Pleno ke-5 tanggal 3 Desember 1960 Sidang Pertama di Bandung,

Setelah membahas :

„Rantjangan Dasar Undang² Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961-1969" hasil karya Depernas, dan menelitinja atas dasar Amanat Pembangunan Presiden pada tanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan dan jang tertulis sebagai garis² besar daripada haluan pembangunan ;

Menimbang :

1. bahwa perlu segera ditetapkan Garis² Besar Pembangunan serta ketentuan² pokok pelaksanaannja ;
2. bahwa pembangunan Nasional Semesta Berentjana adalah suatu pembangunan dalam masa peralihan jang bersifat menjeluruh untuk menudju tertjapainja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila atau Masjarakat Sosialis Indonesia dimana tidak terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia, guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat ;
3. bahwa pembangunan Nasional Semesta Berentjana delapan tahun : 1961-1969 adalah pembangunan

tahap pertama, jang nasional, semesta, berentjana dan berisikan tri-pola untuk meletakkan dasar² pembangunan rochaniah dan djasmaniah jang sehat dan kuat serta pembangunan tata-perekonomian nasional jang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pasang-surutnja pasaran dunia ;

4. bahwa sjarat pokok untuk pembangunan rochaniah jang sehat dan kuat adalah a.l. menegakkan kembali kepribadian dan kebudajaan Indonesia jang berdasarkan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan gotongrojong seperti didjelaskan dalam dasar negara Pantjasila, dan mengutamakan kesadaran hidup bersahadja dan kedjudjuran sesuai dengan adjaran ke-Tuhan-an jang Maha Esa ;
5. bahwa sjarat pokok untuk pembangunan tata-perekonomian nasional adalah a.l. pembebasan ber-djuta² kaum tani dan Rakjat pada umumnja dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan „landreform" menurut ketentuan² hukum Nasional Indonesia, seraja meletakkan dasar² bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat jang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara.

Mengingat :

1. Amanat Penderitaan Rakjat jang terkandung dalam Pembukaan Undang² Dasar RI 1945 ;
2. Pasal² 27 ajat 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 UUD RI 1945 ;
3. Pasal 1 ajat 2 UUD RI 1945 jang menentukan bahwa „Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat" ;
4. Pasal 3 jo. pasal IV Aturan Peralihan Undang² Dasar RI 1945 ;
5. Pasal 2 ajat 3 Undang² Dasar RI 1945 ;
6. Amanat Negara jang diutjapkan oleh Presiden

pada pembukaan Sidang Pertama MPRS tanggal 10/11-1960;

7. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara RI No. I/MPRS/60 tanggal 19 November 1960 tentang „Manifesto Politik RI sebagai Garis² Besar daripada haluan Negara";

8. Permusjawaratan dalam rapat² Komisi², musjawarah dan mufakat Pimpinan MPRS dengan Badan Pembantu Musjawarah (BAPEMUS) dan rapat² MPRS pada tanggal 17/11-60 sampai dengan 3 Desember 1960.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Ketetapan tentang Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969 sbb. :

B A B I

GARIS² BESAR POLA PEMBANGUNAN

P a s a l 1.

(1) Menjatakan bahwa garis² besar Pola Pembangunan termasuk Pola Projek jang dimuat dalam Rantjangan Dasar Undang² Pembangunan Nasional Semesta Berentjana delapan tahun 1961-1969 hasil karya Depernas jang termuat dalam Buku kesatu (1) djilid I, II, dan III pada umumnja sesuai dengan Amanat Pembangunan Presiden tanggal 28/8-59 jang diutjapkan maupun jang tertulis dan pada umumnja sesuai pula dengan Manifesto Politik RI jang telah diperkuat oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan ketetapan No. I/MPRS/1960.

(2) Menerima Garis² Besar Pola Pembangunan hasil karya Depernas seperti termuat dalam Buku kesatu djilid I, II, III sebagai Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dengan ketentuan² seperti termuat dalam pasal² dibawah ini.

B A B II

KETENTUAN UMUM

P a s a l 2.

BIDANG MENTAL/AGAMA/KEROCHANIAN/ PENELITIAN

(1) Melaksanakan Manifesto Politik dilapangan pembinaan Mental/Agama/Kerochanian dan Kebudajaan dengan mendjamin sjarat² spirituil dan materiil agar setiap warganegara dapat mengembangkan kepribadiannja dan kebudajaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh² buruk kebudajaan asing.

(2) Menetapkan Pantjasila dan Manipol sebagai mata peladjaran diperguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.

(3) Menetapkan pendidikan agama mendjadi mata peladjaran di-sekolah² mulai dari Sekolah Rakjat sampai dengan universitas² negeri dengan pengertian bahwa murid² berhak tidak ikutserta, apabila wali murid/murid dewasa menjatakan keberatannja.

(4) Membina se-baik²nja pembangunan rumah² ibadah dan lembaga² keagamaan.

(5) Menjelenggarakan kebidjaksanaan dan sistim pendidikan nasional jang tertudju kearah pembentukan tenaga² ahli dalam pembangunan sesuai dengan sjarat² manusia Sosialis Indonesia, jang berwatak luhur.

(6) Mengusahakan agar segala bentuk dan perwudjudan kesenian mendjadi milik seluruh Rakjat dan menjinarkan sifat² nasional.

(7) Memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak Rakjat dan massa revolusioner.

(8) Kebidjaksanaan penelitian disesuaikan dengan politik luarnegeri bebas dan aktif serta mengikutsertakan Rakjat tanpa meninggalkan sjarat² ilmiah.

Pasal 3.

BIDANG KESEDJAHTERAAN

(1) Kebidjaksanaan pembangunan dibidang kesedjahteraan ditudjukan untuk mewudjudkan kesedjahteraan Rakjat jang merata dalam keseluruhannja.

(2) Mendjamin setiap warganegara akan pekerdjaan dan penghasilan jang lajak guna memenuhi keperluan hidup se-hari^2 bagi dirinja sendiri beserta keluarganja, seperti a.l. keperluan sandang-pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan kebudajaan dan keagamaan serta djaminan untuk hari tua.

(3) Membangunkan usaha^2 chusus untuk meninggikan tingkat hidup kaum buruh, tani, nelajan dan kaum pekerdja pada umumnja dengan menghapuskan beban^2 sebagai peninggalan dari hubungan kerdja kolonial dan feodal serta memberantas pengangguran.

Pasal 4.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/ PERTAHANAN

(1) Untuk mendjamin berhasilnja pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana delapan tahun : 1961-1969, diperlukan penjesuaian seluruh aparatur negara dengan tugasnja dalam rangka pelaksanaan Manipol dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana serta Ketetapan^2 MPRS.

(2) Mengikutsertakan Rakjat dan seluruh alat-kelengkapan serta seluruh semangat dan daja-kerdja bangsa dalam suatu gerakan massa (massa-aksi) jang berbentuk satu organisasi Front Nasional.

(3) Landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta jang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh didjadikan alat penghisapan.

(4) Pertahanan negara RI bersifat defensif-aktif dan bersikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan Rakjat semesta jang berintikan tentara sukarela dan milisi.

(6) Mengingat bahwa djalannja Pembangunan Nasional Semesta Berentjana adalah berhubungan erat dengan pelaksanaan keamanan maka perlu dilaksanakan pembangunan tata-perdesaan jang demokratis (democratic rural development) jang merata dan berentjana sebagai salahsatu landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional semesta.

Pasal 5.

BIDANG PRODUKSI

(1) Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961-1969 supaja ditudjukan kearah pengutamaan produksi bahan keperluan hidup Rakjat jang pokok untuk mentjapai taraf mentjukupi keperluan sendiri serta menudju kearah pembagian pendapatan nasional jang adil dan merata.

(2) Tjabang^2 produksi jang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hadjat hidup Rakjat banjak, dikuasai oleh Negara, djika perlu dimiliki oleh Negara.

(3) Untuk mengembangkan daja produksi guna kepentingan masjarakat dalam rangka ekonomi terpimpin, perlu diikutsertakan Rakjat dalam pengerahan semua modal dan potensi (funds and forces) dalam-negeri, dimana kaum buruh dan tani memegang peranan jang penting.

Pasal 6.

BIDANG DISTRIBUSI DAN PERHUBUNGAN

(1) Pemerintah menjelenggarakan tata-distribusi barang^2 keperluan hidup se-hari^2 agar dapat sampai

ditangan Rakjat dengan tjepat, tjukup, merata, murah dan baik.

(2) Pemerintah mengatur dan menjalurkan distribusi bahan² penting bagi penghidupan Rakjat banjak dengan mengutamakan ikutsertanja koperasi², rukun² kampung, rukun² tetangga serta sedjenisnja dan swasta Nasional sebagai pembantu.

(3) Pemerintah menjelenggarakan impor barang² kebutuhan pokok untuk Rakjat dan bahan² baku serta bahan² penolong untuk industri-vital, dan menguasai ekspor bahan² baku.

(4) Negara menguasai dan menjelenggarakan perhubungan dan angkutan didarat dan laut jang vital serta angkutan udara dan perhubungan telekomunikasi seluruhnja.

Pasal 7.

BIDANG KEUANGAN DAN PEMBIAJAAN

(1) Sumber pembiajaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berentjana itu per-tama² harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds und forces) jang progresif, dengan sedjauh mungkin tidak menambah beban Rakjat.

(2) Djika modal nasional guna pembiajaan pembangunan belum mentjukupi, dapat diadakan kerdjasama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan luarnegeri, dengan ketentuan bahwa hal tsb.:

a. tidak bertentangan dengan Manipol dan Amanat Presiden tentang Pembangunan ;
b. disusun dalam per-undang²an ber-sama² dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Dalam rangka pembangunan tata-perekonomian nasional jang kuat dan bebas, diperlukan adanja suatu sistim moneter jang sehat dan stabil guna melantjarkan

produksi, distribusi dan perdagangan, serta peredaran uang jang berentjana.

Pasal 8.

KETENTUAN PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun : 1961-1969, maka hasil karya Depernas Djilid IV sampai dengan XVII perlu diperhatikan oleh Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan manakala tidak bertentangan dengan ketetapan ini.

(2) Untuk mendjamin berlangsungnja Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun : 1961-1969 pelaksanaan pembangunan ditetapkan dengan ketentuan² per-undang²an.

BAB III
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 9.

(1) Pada Ketetapan ini diikutsertakan tiga lampiran jang dinamakan Lampiran A, Lampiran B dan Lampiran C.

(2) Lampiran A tersebut pada ajat (1) diatas merupakan penjempurnaan daripada Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana karya Depernas, sedangkan Lampiran B dan Lampiran C merupakan pedoman bagi pelaksanaannja.

(3) Isi Lampiran A mempunjai kekuatan sebagai amandemen² daripada Buku kesatu Djilid I, II dan III.

BAB IV

KEKUASAAN PENUH

Pasal 10.

Memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden/ Panglima Tertinggi AP/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan² ini.

Ditetapkan dikota Bandung pada tanggal:
3 Desember 1960.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN
RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Chaerul Saleh

Mr. Ali Sastroamidjojo

K. H. Idham Chalid

D. N. Aidit

Kol. Wilujo Puspojudo

Joop Morriën
Amsterdam

I S I

Katapengantar 3
D.N. Aidit — Putusan² MPRS harus dilaksanakan dengan tenaga² anti-imperialisme dan anti-feodalisme jang lebih konsekwen 5
Njoto — Alasan² golongan Komunis memperkuat Manipol dan Perperintjiannja sebagai garis² besar daripada Haluan Negara 9
Ir. Sakirman — Sjarat² pokok pelaksanaan pembangunan 15
Njono — Soal kesedjahteraan dalam sidang MPRS 27
Asmu — Landreform dan industrialisasi adalah loro-loroning atunggal 31
Nursuhud — Perbedaan pokok „rentjana pembangunan" PRRI-Permesta dengan garis² pola pembangunan MPRS 35
Karel Supit — Ketetapan² MPRS sendjata baru untuk melawan musuh² Rakjat 41
J.P. Rissi — Hapuskan sisa² kekuasaan swapradja dan alat² negara jang anti-Rakjat 47
Umar Lesteluhu — Bebaskan Irian Barat & lenjapkan sisa² feodalisme 53
Messer Tanggap Peleng — Melaksanakan Demokrasi-Terpimpin atas dasar musjawarah 57
Nj. Suharti Suwarto — Pola pembangunan dan kaum wanita 61
Sukatno — Harapan kita sekarang tertudju pada pelaksanaan jang konsekwen dari keputusan² MPRS 65
Ketetapan MPRS RI No. I/MPRS/1960 71
Ketetapan MPRS RI No. II/MPRS/1960 74

Rs. 15.—